

TIM PENYUSUN KKN SISDAMAS



PARADIGMA DAN SIKLUS KKN SISDAMAS

(Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PARADIGMA DAN SIKLUS KKN SISDAMAS

14,8 x 21,0 cm, xii + 73 hlm.

ISBN: 978-602-71007-3-0

Tim Penyusun

Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag.,M.Si

Rohmanur Aziz, M.Ag

Dr. Fridayanti, M.Si

Yadi Mardiyansyah, M.Ag

Wisnu Uriawan, M.Kom

Zulqiyah, M.Si



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penyunting : Dr. Munir, MA

Cetakan 1 Desember 2016

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT., shalawat dan salam dipersembahkan kepada nabi Muhammad SAW, seorang rasul yang telah berhasil dengan gemilang memberdayakan masyarakat dari keadaan *jahiliyah* menjadi masyarakat *madaniyah*.

Buku Paradigma dan Siklus KKN Sisdamas (Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan) merupakan bahan ajar Pelatihan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada KKN Sisdamas Tahun 2017. Istilah KKN Sisdamas hadir atas inisiasi beberapa dosen yang memiliki kepedulian terhadap dinamika masyarakat. Inisiasi kemudian dituangkan dalam tulisan buku ini. KKN Sisdamas juga lahir setelah mempelajari beragam KKN yang ada di PTKIN atas hasil riset yang telah dilakukan oleh Pusat PkM LP2M UIN SGD Bandung ke beberapa PTKIN di Indonesia. Alhasil, dari temuan riset tersebut memberikan satu keinginan agar KKN di UIN SGD Bandung memiliki ke khasan dari KKN yang ada sebelumnya. Tahun 2017, kekhasan itu jatuh pada pilihan KKN Sisdamas, yakni Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

KKN Sisdamas berakar pada kata pemberdayaan. Pemberdayaan atau *empowerment/empowering* adalah proses penguatan masyarakat dengan cara mendorong (motivasi), menjembatani (fasilitasi dan mediasi), serta mendampingi (advokasi) dalam meraih tujuan-tujuan yang baik di masyarakat. Dalam konteks agama, perubahan sosial masyarakat daya merupakan misi dakwah, pemberdayaan umat Islam disebut sebagai *tamkiinu al-Dakwah* yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kepedulian dan kemauan yang keras. Guna merumuskan keberdayaan itu, hadirilah mahasiswa yang peran utamanya sebagai fasilitator dan motivator dimana masyarakat ditempatkan sebagai subjek dari pemberdayaan itu sehingga pemberdayaan bisa berarti kegiatan pembangunan yang dilakukan bersama-sama masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

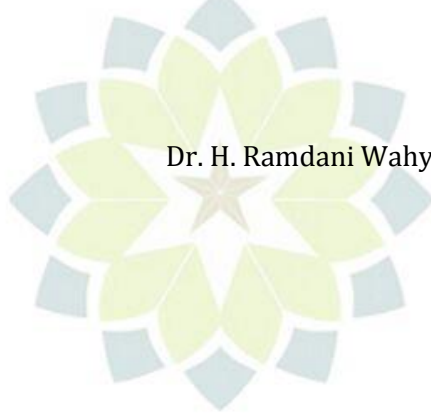
Secara definitif, KKN Sisdamas adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di suatu daerah tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk turut melakukan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip pembangunan partisipatif, demokratis dan berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

KKN Sisdamas merupakan kegiatan akademik dengan basis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen pembimbing lapangan. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Akhirnya, atas selesainya buku Paradigma dan Siklus KKN Sisdamas ini, kami ucapkan terima kasih kepada Sdr Rohmanur Aziz, M.Ag., Dr. Fridayanti M.Si, Yadi Mardiyansah, M.Ag., Muh Muttaqin, M.Pd, Wisnu Uriawan, M.Kom dan Zulqiyah, M.Si yang telah berkeringat dan berusaha payah menghadirkan buku ini. Saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan buku ini sangat dinantikan.

Bandung, Desember 2016

**Kepala Pusat Pengabdian
kepada Masyarakat-LP2M**



Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag.,M.Si

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PARADIGMA KKN SISDAMAS	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Pemikiran.....	2
1. Pengertian KKN Sisdamas	3
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	3
C. Tujuan dan Sasaran	3
BAB II PRINSIP-PRINSIP KKN SISDAMAS	5
A. Belajar Sosial.....	5
B. Partisipasi Masyarakat.....	6
C. Urgensi <i>Social Capital</i> dan <i>Spiritual Capital</i>	13
D. Holistik dan berkelanjutan.....	23
E. Integratif dan partisipatif.....	23
F. Multidisiplin	23
BAB III MODEL KKN DI PTKIN	25
A. KKN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	25
B. KKN di UIN Walisongo Semarang	28
C. KKN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	31
BAB IV SIKLUS KKN SISDAMAS	38
A. Sosialisasi Awal dan Rembug Warga (Soswal dan RW)	41
1. Soswal & RW Tingkat Kabupaten/Kota.....	42
2. Soswal & RW Tingkat Desa	42
3. Soswal & RW Tingkat basis/ komunitas.....	44
B. Refleksi Sosial (Refso)	44
C. Pemetaan Sosial	46
1. Peran DPL, Mahasiswa dan Masyarakat.....	46
2. Pemetaan Kebutuhan, Masalah dan Potensi	47
a. Teknik 1: Pemetaan (Mapping).....	49
b. Teknik 2: Kalender Musim (Seasonal Calendar).....	50
c. Teknik 3: Penelusuran Desa (Transect).....	52
d. Teknik 4: Bagan Hubungan Kelembagaan (Diagram Venn).....	54
e. Teknik 5: Alur Sejarah (Timeline).....	56
f. Teknik 6: Bagan Perubahan dan Kecenderungan (Trend and Change)	58
g. Teknik 7: Bagan Peringkat (Matrix Ranking).....	59
h. Teknik 8: Diagram Alur	60
i. Teknik 9: Wawancara Semi Terstruktur	62
j. Teknik 10: Pohon Masalah dan Harapan (Teknik Analisa Masalah)	63
3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut	65
a. Persiapan Dalam Tim Fasilitator.....	65
b. Menentukan informasi yang akan dikaji.....	65

c. Menentukan teknik yang ingin dipakai	65
d. Menentukan dan menyediakan bahan pendukung dan media;...	66
D. Pengorganisasian Masyarakat (Orgamas)	66
E. Perencanaan Partisipatif (Cantif)	67
F. Sinergi Program (Sipro)	70
1. Penetapan Kegiatan	70
2. Fasilitasi Penyusunan Proposal	70
3. Menggalang Keswadayaan Warga.....	71
G. Pelaksanaan Program (Pepro).....	71
H. Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PARADIGMA KKN SISDAMAS

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu elemen penting dari Tridharma Perguruan Tinggi, disamping elemen lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Sebagai elemen penting, maka pengabdian masyarakat harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012. Dalam undang-undang ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), berkomitmen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Barat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sejak lama persoalan peningkatan kesejahteraan ini dicanangkan sehingga PT wajib merealisasikannya.

Model pemberdayaan merupakan model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered*). Model ini berbeda dengan model-model sebelumnya untuk menutupi kelemahan yang ada dalam program atau model pembangunan sebelumnya.

Yang pertama dari strategi pembangunan adalah model pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan dalam model ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sehingga dilakukan pemulihan struktur produksi jasa dan manufaktur. Proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi. Model pembangunan pertumbuhan ekonomi mengesampingkan masyarakat. Sementara penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan menduduki urutan pembangunan kedua. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai objek dari pembangunan.

Data empirik menunjukkan bahwa model pembangunan pertumbuhan ekonomi gagal mengangkat derajat kehidupan kaum miskin, lebih parah lagi adalah kesenjangan masyarakat miskin-kaya menjadi meningkat.

Pendekatan kedua dari strategi pembangunan adalah model yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Model ini memfokuskan diri pada kelompok penduduk yang miskin. Asumsi yang dikemukakan adalah bahwa masalah kemiskinan yang ada merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat dari proses pembangunan. Pada dasarnya model ini merupakan suatu program bantuan untuk mencapai kesejahteraan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yang mencakup kesempatan memperoleh penghasilan dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, penerangan dan lain-lain. Model ini merupakan suatu langkah maju dalam memberikan pertimbangan pada aspek pembangunan manusia dibandingkan dengan model

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Akan tetapi, model ini memiliki paling tidak dua kelemahan. Pertama masyarakat miskin selalu menanti bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga muncul ketergantungan dan ketidakmandirian. Persoalan kedua adalah besarnya beban anggaran pemerintah seiring dengan bertambahnya masyarakat yang miskin. Pemerintah misalnya harus menanggung beban kemiskinan karena bencana alam yang sifatnya mendadak dan sulit diprediksi. Dalam program ini masyarakat menerima secara pasif program bantuan dari pemerintah.

Penyelesaian dari permasalahan tersebut kemudian dikembangkan model pemberdayaan. Model pemberdayaan menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia melalui upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Perguruan tinggi adalah salah satu elemen masyarakat yang dapat berperan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Perguruan tinggi dapat mendukung program pemerintah untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Guna menselaraskan dengan tujuan pemerintah maka program KKN UIN Sunan Gunung Djati Bandung berupaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 akan dilakukan perubahan pola KKN yang ada selama ini menjadi KKN berbasis pemberdayaan masyarakat atau disebut sebagai KKN Sisdamas

Pada masa-masa sebelumnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Sunan Gunung Djati disebut sebagai Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).. Pola yang dilakukan lebih berorientasi pada pengabdian saja, dimana mahasiswa dan dosen hadir dengan program yang dirancang sebelumnya. Dalam program pengabdian ini, masyarakat masih sebagai objek. Meski menerima manfaat, namun program seperti ini tidak berkelanjutan dan sering kali menjadi sia-sia karena tidak berbasis potensi unik masyarakat setempat.

Dalam program KKN Sisdamas, masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pusat dari program KKN. Masyarakat digali untuk mengenai potensi-potensi yang dimiliki. Program ini menekankan pada partisipasi masyarakat untuk aktif menyelesaikan permasalahan dalam lingkungannya.

Melalui Program KKN Sisdamas posisi mahasiswa sejajar dengan masyarakat. Mahasiswa adalah mitra masyarakat dan mahasiswa adalah fasilitator dari kehendak masyarakat yang ingin berubah. Dalam hal ini mahasiswa berfungsi sebagai penggerak masyarakat sedangkan pelaksana program adalah masyarakat atau komunitas itu sendiri. Melalui Program KKN Sisdamas ini diharapkan dapat mengikis gap perguruan tinggi yang seringkali dituding menara gading pembangunan. Dalam KKN Sisdamas ini, pendekatan yang dilakukan menjadi lebih kontekstual, sesuai dengan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian KKN Sisdamas

KKN berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat di lokasi KKN. Pendekatan ini memiliki orientasi untuk melibatkan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mencari solusi atas situasi dan permasalahan yang dihadapinya. Asumsi KKN Sisdamas adalah masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan transformasi sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Sisdamas, mahasiswa bekerja bersama masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dan masyarakat diposisikan sebagai subjek/pelaku/agen penting dalam proses penyelesaian suatu masalah atau kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan penyelesaian masalah dan pembangunan di tengah masyarakat, mahasiswa sebagai agen perubahan berperan sebagai motivator, dinamisator, innovator, dan fasilitator bagi masyarakat yang didampinginya. Proses demikian akan mendorong proses pembelajaran timbal balik antara mahasiswa dan masyarakat.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Secara konseptual, pemberdayaan merupakan istilah yang dalam bahasa Inggris merujuk pada kata *empowerment*, dimana asal katanya adalah *power* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, maka konsep *empowerment* berarti terjadinya penguatan kekuasaan dari suatu kelompok/komunitas/ masyarakat. Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.¹

Secara garis besar Empowerment atau Pemberdayaan (selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan) dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan menurut Payne adalah untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi serta sosial dalam melakukan tindakan². Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,

¹ J.W. Ife, *J.W. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. (Australia: Longman, 1995)

² M. Payne. *Social Work and Community Care*. (London: McMillan, 1997).

ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri. Mandiri disini maksudnya adalah kemandirian dalam berpikir lalu bertindak dan mampu mengendalikan apa yang dilakukan. Masyarakat diberdayakan agar sadar dengan apa yang dialaminya tidak hanya untuk individu dari tiap masyarakat tapi masyarakat diberdayakan agar terbentuk masyarakat yang aktif dan tidak apatis lagi dengan kondisi sekitar. Terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri, dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi berpangku tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya. Masyarakat akan terbiasa untuk berinisiatif ketika terjadi permasalahan di lingkungannya sehingga pemerintah tidak terlalu terbebani lagi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan sasaran dari kegiatan KKN Sisdamas adalah:

1. Bagi perguruan tinggi, program KKN Sisdamas akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kerjasama berbagai pihak terkait sehingga terjadi sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat serta instansi terkait;
2. Bagi mahasiswa, program KKN sisdamas akan membangun terasahnya kompetensinya mahasiswa. Sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat, mahasiswa diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang memiliki kedekatan dengan permasalahan di masyarakat.
3. Bagi masyarakat, program KKN Sisdamas akan mampu secara swadaya dan swakelola dalam membangun komunitasnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB II

PRINSIP-PRINSIP KKN SISDAMAS

A. Belajar Sosial

Belajar sosial merupakan suatu proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan dan, peniruan perilaku sosial yang dilakukan kelompok atau individu lain. Jenis belajar ini terdapat proses belajar meniru atau menjadikan model tindakan orang lain melalui pengamatan terhadap orang tersebut. Belajar sosial melalui proses Sisdamas ini mengarah pada perubahan perilaku akibat mengamati model.

Teori belajar sosial terkenal dengan sebutan teori *observational learning*, belajar dengan pengamatan' adalah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Tokoh utama teori ini adalah Albert Bandura. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata eflaks otomatis dan stimulus (S-R bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri.¹

Menurut Psikolog Albert Bandura dan rekan-rekannya, suatu bagian utama dari pembelajaran manusia terdiri dari belajar observasional, yang mana merupakan pembelajaran dengan cara melihat perilaku orang lain, atau model. Karena pendasarannya pada observasi terhadap orang lain-fenomena sosial-sudut pandang yang diambil oleh Bandura ini sering disebut dengan pendekatan kognisi sosial tentang belajar². Santrock mengemukakan bahwa pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang meliputi perolehan keterampilan, strategi dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain.³

Bandura (1986) mengatakan bahwa *observational learning* mencakup empat elemen yaitu memperhatikan, menyimpan informasi atau kesan, menghasilkan perilaku dan termotivasi untuk mengulangi perilaku itu.⁴

1. Atensi. Untuk belajar melalui observasi, kita harus memperhatikan. Dalam pengajaran, Anda harus memastikan bahwa siswa memperhatikan fitur-fitur kritis pelajaran dengan membuat presentasi yang jelas dan menggarisbawahi poin-poin penting.
2. Retensi. Untuk meniru perilaku seorang model. Anda harus mengingatnya. Hal ini melibatkan representasi tindakan model itu secara mental dengan cara-cara tertentu, mungkin sebagai langkah-langkah verbal.
3. Produksi. Begitu kita "tahu" bagaimana perilaku seharusnya terlihat dan ingat elemen-elemen atau langkah-langkahnya, kita mungkin tetap belum dapat melakukannya dengan lancar.

¹ Muhibbin Syah. *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Raya Grafindo Perkasa, 2005)

² Bandura Albert. *Self-efficacy in Changing Societies*. (United States of America: Cambridge University Press, 1999).

³ John W. Santrock, John W. *Life-Span Development - Perkembangan Masa Hidup Jilid 2*, terjemahan Juda Damanik, Ahmad Chusairi. (Jakarta : Erlangga, 2002).

⁴ Bandura, A., *Social foundations of thought and action*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986).

4. Motivasi dan *Reinforcement*. Teori pembelajaran sosial membedakan antara perolehan dan perbuatan. Kita mungkin memperoleh sebuah keterampilan atau perilaku baru melalui observasi, tetapi kita mungkin tidak melakukan perbuatan itu sampai ada motivasi atau insentif untuk melakukannya. *Reinforcement* dapat memainkan beberapa peran dalam *observational learning*.⁵

Teori belajar sosial mengemukakan gagasan mengenai belajar dalam situasi yang dialami dimana seseorang belajar dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mengamati berbagai macam model (seperti model-model dalam keluarga, televisi, film) dan *reinforcement* yang diberikan oleh teman sebaya dan oleh pihak lain, kesemuanya berpengaruh penting terhadap belajar. Menurut teori belajar sosial, belajar di dalam masyarakat yang berorientasi pada media memperluas cakrawala dan jangkauan belajar di dalam kelas, secara lembut dan tidak memaksa.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Partisipasi sebagai cara dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: (1) berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (2) merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program (3) menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian.

Partisipasi sebagai tujuan berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti. Partisipasi juga berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Partisipasi memiliki fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekadar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasi dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. Dimana salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

⁵ Woolfolk Hoy, A. *Educational Psychology 9th Edition*. (USA : Pea, 2004).

pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama⁶. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁷

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:⁸

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

⁶ Ach. Wazir Ws., et al., ed. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. 1999). hlm. 29

⁷ Isbandi Rukminto Adi. *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran menuju Penerapan*. (Jakarta: FISIP UI Press. 2007).hlm.27

⁸ Birtha Mikkelsen. *Peneleitian Partisipatoris dan Upaya – upaya pemberdayaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999). hlm.64

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.⁹

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) adalah:¹⁰

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

⁹ Diana Conyers. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991) hlm. 154-155

¹⁰ Monique Sumampouw. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta. h. 106-107

7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi. *Kedua*, yang dimaksudkan bersifat sukarela ialah kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakan oleh pihak lain di luar yang melakukan partisipasi, seperti bayang-bayang pihak pemerintah, desakan, dan manipulasi. Jika yang terakhir sebagai pemicunya, maka kecenderungannya bukan partisipasi masyarakat melainkan mobilisasi masyarakat. Sementara jika yang pertama sebagai pemicunya maka itu adalah partisipasi dalam pengertian otonom.

Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh non-warga negara biasa dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus memiliki tujuan seperti ikut serta terlibat dalam kehidupan masyarakat ialah penggerak untuk mendapat kesukarelaan dalam berpartisipasi. Karena tanpa demikian, kecenderungannya orang yang terlibat dalam kehidupan masyarakat akan ada dalam keterpaksaan.

Dan *kelima*, yang dimaksud memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi masyarakat ialah keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur masyarakat yang ada. Dari mulai yang paling bawah sampai pada tingkatan yang paling tinggi; dan dari mulai yang paling luas cakupannya sampai pada yang paling sempit.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.2.

Tabel Tipe Partisipasi

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; (b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; (b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; (b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan

No.	Tipologi	Karakteristik
		<p>sebagainya;</p> <p>(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;</p> <p>(c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.</p>
5.	Partisipasi fungsional	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;</p> <p>(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati;</p> <p>(c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.</p>
6.	Partisipasi interaktif	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;</p> <p>(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis;</p> <p>(c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.</p>
7.	<i>Self mobilization</i>	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;</p> <p>(b) Masyarakat mengembangkan kontak</p>

No.	Tipologi	Karakteristik
		<p>dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan;</p> <p>(c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.</p>

Sumber: Sekretariat Bina Desa¹¹

Milbarth sebagaimana dikutip Risang Rimbasmaja melakukan pembagian partisipasi yang rutin ke dalam berbagai kategori antara lain, *ediposic versus continous*. Yang dimaksud partisipasi yang episodik adalah partisipasi yang terikat pada waktu spesifik tertentu misalnya dalam pemilu. Yang kontinu, di sisi lain, adalah yang relatif panjang seperti memegang jabatan politis. Dalam bentuk yang episodik, Milbarth membuat pemetaan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang.¹²

Partisipasi masyarakat selain dilihat dari definisi, bentuk, dan tingkatan, juga dapat dilihat dari tipologi dan model. *Pertama*, dari sisi tipologi, partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam katagori partisipasi masyarakat aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.¹³

Partisipasi masyarakat aktif ini menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* masyarakat, sedangkan partisipasi masyarakat pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi masyarakat aktif maupun partisipasi masyarakat pasif. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem masyarakat yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut sebagai kelompok apatis.

Tipologi partisipasi masyarakat dapat pula didasarkan pada jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Partisipasi masyarakat individual ialah kegiatan warga negara secara perorangan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud partisipasi masyarakat kolektif adalah

¹¹ Ach. Wazir Ws., et al., ed.op.cit. h.32-33

¹² Risang Rimbasmaja. *Segmentasi Pemilihan Pemula di DKI Jakarta pada Pemilu 2004 Berdasarkan Karakteristik-Karakteristik. Sosio-Politik dan Life-Style*. Skripsi. UI. Depok, 2004).

¹³ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992).

kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif konvensional seperti kegiatan dalam pemilihan kepala desa dan partisipasi kolektif non-konvensional (agresif), seperti pemogokan yang sah, pembangkangan warga negara (*civil disobedience*), menguasai bangunan umum, dan huru-hara.

Partisipasi masyarakat kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan aksi yang lemah ini tidak menunjukkan sifat yang baik atau buruk.

C. Urgensi *Social Capital* dan *Spiritual Capital*

Modal sosial yang pertama kali dikenalkan Robert Putnam menyebutkan bahwa "modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokrasi"¹⁴. Putnam mendefinisikan *social capital* sebagai suatu *trust*, *norm*, dan *network* yang mempermudah koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (*mutually coordination*). Modal sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memahami tindakan/aktivitas suatu kelompok sosial. Keterkaitannya dengan aspek nilai, kepercayaan, dan jaringan. Robert Putnam menekankan bahwa jaringan-jaringan, nilai-nilai dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota perkumpulan dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama.

James Coleman memberi batasan modal sosial sebagai "seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak". Coleman menambahkan bahwa modal sosial merupakan "aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial"¹⁵. Coleman (1999: 14) menyatakan bahwa kerjasama atas kepercayaan tidak lepas dari unsur kekeluargaan/kekerabatan dan non-kekeluargaan/kekerabatan. Menurutnya, sebagaimana mengutip Porath, bahwa dalam dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut *F-Connection*. *F-Connection* adalah suatu bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan *Firms* (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Coleman (1999: 20-23) juga menjelaskan bahwa ada tiga bentuk yang dicirikan oleh *social capital*, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (*obligations and expectations depend on trustworthiness*), kemampuan saluran informasi (*informations channels*), dan norma-norma dengan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Ketiga bentuk *social capital* ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal manusia (*human capital*).

¹⁴ Robert Putnam. *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*. (Princeton : Princeton University Press, 1993).

¹⁵ James Coleman, 1990, . h.300.

Penjelasan Coleman mengenai *social capital* tampaknya menekankan pentingnya keseimbangan antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang antara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia (*human capital*) atau yang biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Apa yang dikatakan bentuk modal sosial oleh Coleman, dilihat Portes sebagai sumber modal sosial. Sumber itu sendiri, tegas Alijandro Portes (1995), bukan modal sosial. Konsep modal sosial merujuk pada kemampuan Individu untuk memobilisasi sumber-sumber langka terhadap permintaan. Sumber langka tersebut memiliki karakteristik sebagai "hadiah", sebab sumber tersebut tidak diharapkan untuk dibayar dalam sejumlah uang atau nilai lainnya pada periode masa tersebut. Sumber yang diperoleh lewat modal sosial tersebut sering mengandung harapan resiprositas pada bentuk yang sama di masa datang. Portes mengajukan 4 sumber modal sosial yaitu niali, solidaritas, resiprositas, dan kepercayaan. Portes membatasi modal sosial sebagai "kemampuan indiviu-individu untuk mengatur sumber-sumber langka tersebut dapat bersifat nyata secara ekonomi seperti potongan harga dan utang bebas bunga, ata tidak nyata seperti informasi tentang kondisi bisnis.¹⁶

Menurut Portes bahwa ekspektasi kolektifitas sebagai sumber *social capital* dalam ekonomi dapat dibedakan ke dalam empat tipe, yaitu: (1) *value introjection*, yakni nilai yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan prilaku kolektif (2) *the dynamics of group affiliation*, tipe ini menunjukkan bahwa individu tidak diharapkan berperilaku sesuai dengan moralitas kelompok tetapi lebih bersifat sukarela, (3) *bounded solidarity*, yakni suatu tipe yang terbentuk bukan karena pemaksaan nilai-nilai masyarakat atau melalui pertukaran resiprositas, tetapi lebih sebagai reaksi situasional terhadap kondisi yang dihadapi (4) *enforceable trust*, yakni sebagai sumber *social capital* yang berhubungan dengan perbedaan antara rasionalitas formal dan rasionalitas substanstif dalam transaksi pasar. Rasionalitas formal dilandasi oleh transaksi yang didasarkan pada norma-norma universal dan berlaku terbuka. Sementara rasionalitas substanstif melibatkan obligasi tertentu dalam monopoli maupun semi monopoli yang menguntungkan kelompok tertentu.

Fukuyama dalam bukunya trust mengemukakan bahwa *Social capital* harus mengacu kepada kapasitas individu untuk mendapatkan sumber-sumber yang langka dengan memanfaatkan keanggotaannya pada suatu jaringan atau suatu struktur sosial tertentu. Ia mengatakan bahwa "*Social capital is a capability that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community.*(Social capital adalah kemampuan yang muncul dalam suatu

¹⁶ Alejandro Portes, (2006). "Institutions and Development: A Coceptual Reanalysis." *Population and Development Review* 32 (2): 233-262 (June). h.12-13

komunitas yang normal, jujur, kooperatif, yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara wajar pada bagian dari anggota komunitas tersebut).¹⁷

Dari pendefinisian mengenai kepercayaan dan *social capital* seperti yang dijelaskan Fukuyama di atas, maka kepercayaan tidak lain adalah efek samping yang penting dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan *social capital*. Kepercayaan muncul dalam komunitas yang saling berbagi norma-norma kejujuran dan kesediaan untuk saling tolong menolong dan oleh karenanya mampu bekerjasama satu dengan yang lainnya. Fukuyama menjelaskan bahwa kerjasama dibentuk melalui dua kategori, yakni seleksi kerabat (*kin selection*) dan resiprositas. Seleksi kerabat meniscayakan adanya perbedaan antara keluarga inti dan keluarga yang semakin besar. Hubungan keluarga, seperti anak-ayah dan adik-kakak, memiliki keterlekatan yang kuat dibanding dengan keluarga yang jauh dan kenyataan ini meniscayakan adanya tingkat altruisme diantara mereka. Sedangkan kerjasama yang berasal dari resiprositas tidak mengharuskan dari seleksi kerabat, tetapi bisa berasal dari non-kerabat, seperti karena hubungan pertemanan, ketetanggan, atau bahkan dari orang lain yang sebelumnya belum pernah diketahui identitasnya.

Resiprositas dilakukan melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan hubungan pendekatan yang cukup lama di antara pihak-pihak terlibat, yang memungkinkan hubungan itu menjadi jelas dan bernilai, bukan atas dasar perilaku oportunistik yang dapat membuat retaknya hubungan. Karena itu untuk menjaga hubungan dalam melakukan kerjasama, maka dilakukanlah kontrak-kontrak di antara pihak-pihak tersebut. Namun demikian batasan kontrak itu sendiri menemui banyak perdebatan. Tetapi dari beberapa substansi perdebatan tersebut muncul dua kategori kontrak, yakni yang eksplisit dan yang implisit. Kategori kontrak yang pertama sangat menekankan akan adanya bentuk perjanjian yang tertulis, seperti yang dilakukan oleh badan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kategori yang kedua lebih dilandasi oleh unsur kepercayaan, tidak dinyatakan secara tertulis namun hanya menyandarkan pada kejujuran masing-masing pihak, dan kategori yang kedua ini dapat mengarah pada terbentuknya sosialibilitas spontan.

Selain memerlukan pendekatan yang lama, resiprositas juga memerlukan reputasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Seseorang yang memiliki reputasi akan mendapatkan kemudahan dan pelayanan tersendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu menurut Misztal (1996) bahwa reputasi yang baik akan memunculkan harapan-harapan yang jelas dari yang lainnya, serta memungkinkan untuk melakukan pertukaran, baik barang maupun pelayanan-pelayanan, dengan bentuk rekomendasi-rekomendasi.

Trust akan mampu menekan biaya (*cost*), terutama yang dijalankan dengan kesepakatan-kesepakatan informal. *Trust* akan mampu mengurangi pengurusan biaya kontrak yang berkepanjangan seperti yang dilakukan pada

¹⁷ Fukuyama, F. *Social Capital*. (George Mason University; Institute of Public Policy, 1997). h.26

kesepakatan-kesepakatan formal. *Trust* dapat mengurangi resiko yang tidak terduga yang pasti akan dialami oleh setiap orang yang berbisnis. *Trust* juga mampu mengurangi terjadinya pertikaian dan proses hukum yang terjadi akibat adanya pertikaian. Dan *trust* mampu mengurangi biaya dan waktu yang sering dikaitkan dengan sistem pengawasan tradisional (seperti yang ada pada sistem formal) dan kontrak hukum formal.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan *trust* dalam suatu kerjasama, Fukuyama mengajukan konsep *radius of trust*. Menurut Fukuyama bahwa konsep *radius of trust* meniscayakan adanya kriteria keberhasilan suatu kerjasama sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepercayaan yang terbangun di antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama, baik kerjasama atas seleksi kerabat maupun kerjasama atas non-kerabat. Kerjasama akan berhasil bertahan lama jika di dalamnya terbangun derajat kepercayaan (*radius of trust*) tinggi. Yaitu, norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi di antara anggotanya. Sebaliknya ikatan akan mudah hancur bahkan tidak terbentuk sama sekali apabila derajat kepercayaannya (*radius of trust*) rendah. Kepercayaan rendah ditandai dengan sikap mementingkan individu dan saling curiga. Dan tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan sosial (*ipso facto*) yang mencerminkan kurangnya *social capital*.¹⁸

Fukuyama mengajukan dua kategori komunitas masyarakat yang dikotomis, yakni komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan komunitas masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah. Jenis pertama menggambarkan tingkat *trust* yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang telah didesentralisasikan pada fase pra-modern. Organisasi kecil yang memiliki banyak relasi dapat memanfaatkan ekonomi sambil menghindari biaya *overhead* dan birokrasi yang membebani organisasi besar. Ekonomi masyarakat yang demikian mempunyai keunggulan fleksibilitas yang tinggi, karena masyarakatnya mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi.¹⁹

Komunitas yang memiliki kepercayaan tinggi dicontohkan Fukuyama seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Pada negara-negara tersebut masyarakatnya dianggap memiliki kemampuan untuk membuat sosiabilitas spontan yang lebih mengedepankan hubungan-hubungan informal. Sementara kepercayaan rendah dicontohkan pada Cina, Hongkong, dan Taiwan, karena pada negara-negara tersebut masyarakatnya kurang memiliki kemampuan membentuk sosiabilitas spontan yang biasanya cenderung menerapkan hubungan-hubungan dengan aturan-aturan formal. Komunitas yang memiliki kepercayaan rendah biasanya lebih memilih hubungan primordial daripada membentuk komunitas yang terbuka, seperti komunitas dengan ikatan

¹⁸ Francis Fukuyama. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002).hlm.71

¹⁹ Francis Fukuyama. *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, (New York : Free Press. 1995)hlm.26

keluarga yang kuat akan memiliki hambatan untuk mempercayai komunitas dari keluarga lain.

Kepercayaan tinggi (*high trust*) akan memudahkan terbentuknya jaringan. Kemampuan suatu perusahaan untuk bergerak dari hierarki-hierarki besar ke jaringan fleksibel perusahaan-perusahaan kecil akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dan modal sosial (*trust & social capital*) yang hadir dalam masyarakat luas. Masyarakat berkepercayaan tinggi seperti Jepang dan Jerman berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik sebelum revolusi informasi memasuki kecepatan yang lebih tinggi. Masyarakat berkepercayaan rendah mungkin tidak akan pernah mampu meningkatkan efisiensi yang ditawarkan teknologi informasi. Karena itu, selain jaringan juga ada norma yang melekat pada masyarakat. Norma boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar, tetapi norma juga sangat mungkin mencakup standar profesional dan aturan-aturan perilaku seperti kode etik. Seorang dokter bekerja atas dasar kode etik. Begitu pula bagi para pedagang mungkin memiliki aturan-aturan perilaku yang mengikat di antara mereka.

Sementara *World Bank* menyebutkan bahwa "*Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions.*"²⁰ Pierre Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai "sumberdaya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif".

Dengan demikian, maka modal sosial merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan (*networking*), kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*value and norms*) serta kekuatan menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya (*economic capital, cultural capital, political capital, and money capital*).

Adapun investasi sosial yang diperoleh di sini maksudnya berupa sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan. modal sebagai investasi sosial memiliki aspek statis dan dinamis. Aspek statis dari modal sosial adalah sumber daya sosial, sedangkan aspek dinamisnya adalah kekuatan menggerakkan. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari modal sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial jaringan, kepercayaan, nilai dan norma merupakan modal yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Investasi bisa terjadi jika aktor memiliki sumber tersebut. Sementara sumber daya dari modal sosial meliputi jaringan, kepercayaan, nilai dan norma. Jaringan merupakan hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Simpul dilihat melalui aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para aktor tersebut. Dalam kenyataan, dimungkinkan terdapat banyak jenis ikatan antar

²⁰ *World Bank, The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital.*

simpul. Jaringan dikatakan sebagai sumber daya dari modal sosial karena dengan kepemilikan” hubungan antar individu yang memiliki makna subyektif yang berhubungan atau dikaitkan sesuatu sebagai simpul dan ikatan” maka para aktor memiliki sesuatu kapital yang mampu diinvestasikan dalam suatu struktur hubungan sosial. Kepercayaan merupakan keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, diman keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis). Sedangkan, nilai dipahami sebagai gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Gagasan seperti ini dikenal sebagai nilai. Oleh karena itu, nilai berkait dengan ide yang dimiliki secara bersama tentang sesuatu itu baik atau buruk, diharapkan atau tidak diharapkan.

Modal sosial dari aspek jaringan bisa berfungsi optimal dan bermanfaat bagi warga masyarakat bila mereka memiliki suatu nilai inti yang disebut *civic engagement*. Istilah *civic engagement* bisa diterjemahkan sebagai "pertemuan antarwarga yang didasari oleh pertautan emosional mendalam, hubungan yang hangat, perasaan dekat secara psikologis, dan ikatan solidaritas yang terbangun atas dasar empati dan persaudaraan menyeluruh". Karena itu, modal sosial dengan nilai inti *civic engagement* itu mengandung tujuh derivasi nilai yang sangat esensial yaitu: (i) *empathy*, (ii) *reciprocity*, (iii) *generosity*, (iv) *moral obligation*, (v) *social solidarity*, (vi) *public trust*, dan (vii) *public spirit*.

Dalam melakukan kajian jaringan sosial, terdapat empat bidang penelitian yang dapat dikerjakan oleh sosiolog, yaitu jaringan informal terhadap akses dan kesempatan, jaringan formaldari pengaruh dan kekuasaan, organisasi sebagai jaringan perjanjian, serta jaringan sosial dalam produksi. Pertama, jaringan informal dari akses dan kesempatan. Penelitian yang dilakukan Granovetter (1973; 1974; 1983) memperlihatkan bahwa suatu ikatan, apapun bentuknya: lemah atau kuat, memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Suatu ikatan jaringan yang kuat memberikan basis motivasi yang lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan, ikatan kuat, misalnya memudahkan seseorang untuk mengetahui ketersediaan suatu pekerjaan. Ikatan kuat dicirikan sebagai waktu dan emosi intensif, dengan keintiman dan perilaku resiprokal. Ikatan ini ditemui pada hubungan dari pertemanan akrab atau keanggotaan suatu keluarga. Sedangkan ikatan lemah ditandai dengan waktu dan emosi yang kurang intensif, yang ditemui dalam hubungan dari suatu perkenalan seperti teman kelas atau teman biasa. Anggota keluarga baisanya akan lebih dahulu mengetahui informasi tentang tersedianya suatu pekerjaan dibandingkan dengan teman biasa dari seorang penentu dalam pemberian pekerjaan.

Granovetter melihat bahwa ikatan yang lemah juga penting dalam kehidupan. Ikatan lemah antara dua aktor, misalnya dapat membantu sebgai jembatan antara dua kelompok yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu, kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isoalasi tersebut berdampak pada sistem sosial yang menjadi semakin

terfragmentasi. Seorang individu tanpa ikatan yang lemah akan menemukan dirinya dalam keadaan terisolasi dalam sebuah kelompok lain maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

Kedua, jaringan formal pengaruh dan kekuasaan. Kajian ini menggunakan pendekatan analitis untuk menjelaskan kekuasaan aktor-aktor ekonomi (Mintz dan Schwartz, 1985; Burt, 1992; Mizruchi, 1992). Kubu pemikiran ini mempercayai bahwa "kekuasaan melekat situasional, ia bersifat dinamis dan tidak stabil secara potensial". Sementara itu menurut Powell dan Smith-Doerr, kekuasaan itu sendiri didefinisikan sebagai otoritas formal, pengaruh informal, dan dominasi. Analisa jaringan sosial tentang kekuasaan meliputi kesemua tipe kekuasaan. Sumber kekuasaan terdiri dari legitimasi, informasi dan kekuatan. Kekuasaan berada dalam posisi struktural.

Dalam memahami jaringan sosial dalam kekuasaan dapat didekati dengan tiga perspektif, yaitu pertukaran sosial, ketergantungan sumber daya, dan kelas sosial. Perspektif pertukaran sosial meyakini bahwa meskipun individu silih berganti datang dan pergi di atas tampuk kekuasaan, namun distribusi kekuasaan dalam posisi-posisi akan tetap sama.

Jaringan sosial dalam kekuasaan formal dalam perspektif pertukaran sosial memandang aktor sebagai makhluk yang rasional. Aktor dikatakan rasional karena dia mempertimbangkan untung rugi. Aktor mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkannya (*cost benefit ratio*). Oleh sebab itu, makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh terhadap suatu kepatuhan pada atasan makin besar kemungkinan suatu tingkah laku akan diulang. Sebaliknya makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh apabila menyimpang dari perintah atasan maka makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Dengan demikian, jaringan sosial dibentuk dan dipertahankan atas prinsip rasionalitas untung rugi. Oleh karena itu, *reward* (ganjaran) dan *punishment* (hukuman) merupakan penggerak dalam jaringan hubungan sosial dalam suatu pertukaran sosial antara atasan dan bawahan. Bentuk *reward* (ganjaran) dan *punishment* (hukuman) tidak selalu dalam bentuk ekstrinsik seperti uang, barang atau benda lainnya; tetapi juga bisa bersifat intrinsik seperti perhatian, cinta, dan seterusnya. Memang bisa juga dalam bentuk campuran antara ekstrinsik dan intrinsik.

Perspektif ketergantungan sumber daya biasanya membahas tentang posisi suatu perusahaan dalam suatu jaringan. Suatu perusahaan akan mempunyai serangkaian dari hubungan-hubungan dan akan diikat oleh hubungan-hubungan lain atau posisinya dalam sistem jaringan yang lebih luas. Organisasi-organisasi melekat secara khas dalam jaringan ganda, sering jaringan-jaringan tersebut tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Perspektif kelas sosial dalam analisis jaringan sosial berlandaskan suatu argumentasi bahwa hubungan ekonomi, politik dan sosial di antara kelompok elit menciptakan suatu kekuasaan elit yang padu (Mills, 1959). Bila perspektif ketergantungan sumber daya melihat organisasi sebagai aktor dan individu utama sebagai agen mereka; sedangkan menurut perspektif kelas sosial,

individu dipandang sebagai aktor utama dan organisasi sebagai sarana mereka. Untuk mengabadikan status dan kendali yang mereka miliki, jaringan yang terikat erat dengan pemimpin perusahaan, melalui hubungan dengan organisasi seperti klu sosial eksklusif dan universitas elit, dibentuk. Jaringan iner-organisasi yang dibentuk dari asosiasi ini merupakan kendaraan untuk memperkuat integrasi elit kekuasaan dan mempertahankan kendali institusi sosial kunci.

Ketiga, organisasi sebagai jaringan sosial dan perjanjian. Jaringan organisasi dapat dianalisis atas dasar organisasi formal dan organisasi informal. Menurut Dalton formal berarti sesuatu yang direncanakan dan disetujui atasnya, sedangkan informal berarti iaktan-iaktan yang spontan dan fleksibel di antara anggota-anggota yang dituntun oleh perasaan-perasaan dan kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertahankan oleh kegiatan formal. Baik organisasi formal ataupun organisasi informal tidak dapat terlepas dari hubungan. Sementara organisasi formal, biasanya mempunyai struktur hierarkis, dihubungkan secara mendalam dengan jaringan yang lebih luas, sedangkan jaringan informal dapat tidak memihak dan menembus batas struktur yang hierarkis.²¹

Melalui jaringan dengan organisasi dan sebagian dari proses reorganisasi yang lebih luas, secara vertikal organisasi yang terintegrasi merampingkan hierarkis perusahaan. Gerakan ini merupakan bagian dari proses pelapisan jaringan perusahaan global baru atas dasar hierarki produksi internasional lama²². Jaringan memberikan suatu cara bagi perusahaan besar untuk mengamalkan taruhannya dalam menghadapi ketidakpastian dan hambatan pasar (Mowery, 1998). Desentralisasi produksi tidak memerlukan suatu desentralisasi kekuasaan.

Keempat, jaringan sosial dari produksi. Jaringan sosial dari produksi memandang penting arti dari suatu kepercayaan (*trust*). Misalnya, dalam suatu proses monitoring kegiatan produksi maka akan lebih mudah dan lebih alami serta sangat efektif apabila dilakukan oleh teman sejawat dibandingkan atasan (Powell, 1990). Selain itu, seperti yang telah ditemukan Sabel (1993) monitoring tidak hanya mengurangi kemungkinan "bermuka dua", tetapi yang lebih penting dari itu adalah fungsinya sebagai hubungan rutin antara bagian-bagian. Konsultasi mengurangi salah tafsir dan kesalahan lainnya.

Dengan demikian, modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh *social entrepreneur* karena walaupun dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai-nilai: saling pengertian (*shared value*), *trust* (kepercayaan) dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*), yang merupakan representasi dari konsep modal sosial. Keberhasilan negara Jerman dan Jepang adalah karena akar dari *long-term relationship* dan etika kerjasama yang mampu untuk menumbuhkan inovasi dan mengembangkan industri di negara masing-masing. Bank Dunia

²¹ Dalton M. *Men Who Manage*. 15 Maret 2011. <http://www.pemustaka.com/hlm.219>

²² Amin Tunggal Wijaya., *Manajemen Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1983). hlm.219

menyatakan pula bahwa permasalahan yang kritis dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya di desa, adalah modal sosial yang tidak memadai. Gambarnya seperti "*virtuous circle of social capital*" yang diawali dengan penyertaan awal dari modal sosial oleh *social entrepreneurs*. Selanjutnya dibangun jaringan kepercayaan dan kerjasama yang makin meningkat sehingga dapat akses kepada pembangunan fisik, aspek keuangan dan sumber daya manusia. Pada saat unit usaha dibentuk (*organizational capital*) dan saat usaha sosial mulai menguntungkan maka makin banyak sarana sosial dibangun. Keberhasilan Grameen Bank adalah salah satu bukti dari manfaat ini.

Lalu apa spriritual capital Robert J. Barro memberikan analogi modal spiritual ini seperti modal manusia (*human capital*) dalam sistem konvensional (Robert J. Barro, 2004). Pierre Bourdieu (1930-2002) membedakan antara modal spiritual (*spiritual capital*) dengan modal agama (*religious capital*). Yang pertama mencakup aspek yang lebih luas pada masyarakat yang lebih beragam, dijalankan oleh pola produksi, konsumsi, pertukaran dan konsumsi yang lebih kompleks (*extrainstitutional*). Sedangkan yang kedua dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (*institutional*).²³ Victor Nee melalui *New Institutionalism*-nya sebenarnya hanya melanjutkan konsep modal sosial (*social capital*) yang sudah diperkenalkan sebelumnya oleh beberapa sarjana seperti Robert D. Putnam (1993 dan 2000).

Terdapat pelbagai definisi 'modal spiritual' yang diajukan oleh para pakar. *Pertama*, 'modal spiritual' didefinisikan dengan mempertentangkannya dengan jenis-jenis modal lain. Berbeda dengan jenis-jenis modal lain, modal spiritual mengacu kepada efek dari praktik-praktik, kepercayaan-kepercayaan, jaringan-jaringan dan pranata-pranata spiritual dan religius yang memiliki suatu dampak 'terukur' pada individu, komunitas dan masyarakat. *Kedua*, modal spiritual mengimplikasikan kepemilikan suatu kemampuan yang dijuluki 'kecerdasan spiritual'.

Modal spiritual dapat dibedakan dengan modal religius (*religious capital*). Modal religius (Iannacone, 1990) mengacu kepada modal yang diakumulasi dari kegiatan religius. Pemilik modal ini memiliki beberapa kecenderungan (dimensi sosial dan kultural), antara lain: Mempertahankan keyakinan agama tertentu sebagai suatu bentuk identitas seumur hidup dan melintas generasi, memelihara agama sebagai suatu syariat. Modal religius juga dapat bertalian dengan ikhwil ketergantungan atau ketagihan (*addiction*), pembentukan kebiasaan, perubahan selera, ke-tidak-konsistenan waktu dan kontrol diri.

Dalam konteks yang umum, modal spiritual seakan-akan memiliki citra yang lebih positif dibandingkan dengan modal religius, karena spiritualitas sering diasosiasikan dengan sekularitas (kegiatan non-agama) dan lebih lentur, serta terapeutik. Sementara itu, kegiatan agama, sebagai contoh, Kristen Protestan di Amerika Serikat, sering diasosiasikan dengan karakter

²³ Bradford Verter; "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu." In: *Society Theory*, Vol. 21, No. 2 (June, 2003): h. 150-174

konservatif. Modal spiritual juga memiliki pelbagai kesamaan dengan modal religius, terutama dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kepercayaan, kegiatan dan pranata religius. Sebagai contoh, sebagian dari para pemeluk agama (gereja) di Amerika Serikat adalah anggota asosiasi, filantropi dan suka-relawan (Putnam 2000). Dengan demikian, mereka mengembangkan suatu modal sosial sekaligus religius dan/atau spiritual.

Guna memudahkan pemahaman modal spiritual lebih lanjut, kita dapat melihat penjelasan yang diajukan oleh Danah Zohar. Menurut Zohar (2010, p. 2), modal spiritual merupakan 'kekayaan, kekuasaan dan pengaruh yang kita peroleh melalui tindakan dengan suatu makna yang dalam, nilai-nilai kita yang terdalam, dan suatu pemahaman akan tujuan yang lebih tinggi, dan semua ini paling baik diungkapkan melalui suatu kehidupan yang diabdikan untuk pelayanan.' Lebih lanjut, kecerdasan spiritual mengacu kepada kecerdasan melalui mana kita membangun modal spiritual. Dengan mencari makna dalam kehidupan kita dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai terdalam, kita dapat mengabdikan diri kita pada kehidupan untuk pelayanan yang berbasis kepada kapasitas yang paling sesuai dengan kita, apapun yang kita pilih untuk lakukan baik untuk tujuan pribadi atau professional. Modal spiritual berperan dalam menumbuhkan motivasi pada tataran-tataran yang lebih tinggi dalam eksplorasi, kerjasama, penguasaan diri dan situasi, kreativitas dan pelayanan. Zohar meyakini bahwa suatu motivasi untuk melayani sesuatu yang lebih besar daripada kita—keluarga, komunitas, siswa dan mahasiswa, karyawan, pelanggan, kemanusiaan, lingkungan, generasi masa depan kita, dan kehidupan kita—merupakan bentuk spiritualitas yang dapat kita tempuh. Pelayanan demikianlah, yang ditawarkan dengan karunia dan harga diri yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan apa yang disebut dalam agama-agama sebagai 'Tuhan' dan menjadikan kita 'agen' Tuhan di dunia ini (Zohar 2010).

Dewasa ini, tindakan-tindakan sehari-hari yang semi-ritual atau ritual dan pelayanan membangun modal spiritual. Pelbagai selebrasi, dari peringatan momen-momen yang bermakna dalam kehidupan hingga perayaan-perayaan religius, bertalian dengan makna yang lebih tinggi dan merupakan modal spiritual yang penting. Berbeda dengan pakar-pakar lain, karya Zohar tentang modal spiritual tidak perlu semata-mata dikaitkan dengan agama. Menurut Zohar, modal spiritual yang dimaksudkannya meliputi seorang yang atheis, yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dalam, suatu pengertian akan tujuan yang lebih tinggi, yang didorong oleh suatu motivasi pelayanan. Di lain pihak, disayangkan, bahwa seseorang dapat menjadi suporter dari suatu agama, tetapi picik karena hanya menganggap agamanya yang terbaik, bertindak penuh permusuhan kepada pemeluk agama lain atau kemanusiaan secara umum. Bila dipraktikkan dengan toleran, penuh harga diri, pikiran-terbuka, afiliasi religi dapat menumbuhkan modal spiritual, dan dapat menjadi sumber kekuatan yang besar (Zohar 2010, 2004).

Orang tidak perlu secara absolut menemukan makna dan tujuan dalam hidup, atau bersikeras ingin 'menjadi orang baik'. Modal spiritual tidak

bertalian dengan 'benar' atau upaya mempertahankan kebenaran yang terakhir. Konsepsi kita pada Yang Kuasa adalah modal spiritual yang memungkinkan kita berhubungan dengan semua makna nilai-nilai dan pengertian akan tujuan hidup. Pendeknya, modal spiritual mencerminkan nilai-nilai inti, sistem-sistem nilai seseorang dan daya dorong internal dari manusia. Modal sosial yang asli (*genuine*) harus meliputi dimensi spiritual dan mental, yang menambah kepada tujuan-tujuan utama dalam membangun hubungan-hubungan yang lama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda (Zohar 2010, 2004).

D. Holistik dan berkelanjutan.

Program KKN Sisdamas dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam sebuah rancangan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam prinsip ini maka permasalahan nyata dilihat secara holistic dan tidak parsial. Sebuah solusi permasalahan dirancang berkelanjutan atau penyelesaian suatu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat saja solusi permasalahan memerlukan tenaga ahli sebagai nara sumber yang bersifat interdisiplin.

E. Integratif dan partisipatif

Pengertian prinsip integrative-partisipatif adalah bahwa pelaksanaan KKN Sisdamas menuntut adanya sinergi antara mahasiswa dan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan, mulai sejak awal program yaitu tahap perencanaan program (sosialisasi awal-rembug warga, pemetaan sosial, pegorganisasian masyarakat, dan perencanaan partisipatif, dan sinergi program) sampai ke tahap pelaksanaan. Untuk melakukan prinsip ini maka para mahasiswa harus memiliki kemampuan mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif,

F. Multidisiplin

KKN Sisdamas adalah bentuk KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. KKN Sisdamas merupakan KKN yang dirancang dengan melibatkan pemilihan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipilih akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi permasalahan di lokasi KKN Pelaksanaannya dikoordinasi oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M. Kegiatan-kegiatan KKN sisdamas harus dikembangkan berdasarkan keterpaduan berbagai aspek, meliputi sosial budaya (termasuk agama di dalamnya), ekonomi, teknologi dan ekologi (lingkungan) dan dirancang secara terstruktur sehingga mempunyai makna strategis bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi KKN sisdamas akan memfasilitasi penemuan/pengembangan pengetahuan dan teknologi baru, menjadi wujud nyata pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for*

sustainable development) bagi civitas akademika dan sekaligus masyarakat, serta sekaligus merupakan pengabdian perguruan tinggi dan mitra kerja yang lain kepada masyarakat.



BAB III

MODEL KKN DI PTKIN

A. KKN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan beragam pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk salah satunya melalui kegiatan KKN. KKN dan segala derivasinya adalah metode partisipatori *community engagement* yang aktor utamanya adalah mahasiswa. Di mana dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu.¹

Mulai tahun 2016 ini, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan perubahan dalam pelaksanaan KKN, perubahan tersebut terlihat pada pola pelaksanaan pendaftaran KKN. Pada tahun sebelumnya pendaftaran KKN dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa. Mahasiswa lah yang menentukan siapa yang menjadi anggota di kelompoknya kemudian memilih desa. Berdasarkan pengalaman tahun 2015, pola seperti itu mengalami kendala saat sebaran fakultas dalam satu kelompok tidak merata. Padahal mengintegrasikan sejumlah keilmuan fakultas dalam satu kelompok merupakan salah satu misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karenanya, pada tahun ini pengelompokan anggota KKN dan penentuan lokasi KKN akan dilakukan oleh PPM. Atas dasar itulah, mengapa PPM merubah pola pendaftaran KKN-PpMM pada tahun 2016.²

Setiap mahasiswa semester VI yang telah memenuhi persyaratan KKN wajib mengisi formulir isian ini sebagai syarat awal untuk menjadi calon peserta KKN-PpMM 2016. Semua data akan direkap dan dikelompokkan secara acak oleh PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mempertimbangkan sebaran fakultas dan gender.

Bentuk KKN terdiri atas:

1. KKN Reguler (kelompok), yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di masyarakat secara berkelompok;
2. KKN Bebas Terkendali/Mandiri, yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk program KKN mandiri secara individual;
3. KKN Relawan (kelompok/Individual) merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok yang menjadi relawan dalam program kepedulian dan penanganan bencana alam yang terjadi di masyarakat;
4. KKN in Campus (individual) yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya di lingkungan kampus dan sekitarnya secara individu;

¹ Wawancara dengan Kapus PKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jaka Badranaya, 2 Agustus 2016

² Ramdani Wahyu Sururie dan Iir abd Haris, *Konsep dan Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKIN*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2016). hlm 126

5. KKN internasional merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang ikut tergabung dalam pelaksanaan KKN reguler.

Tahapan kegiatan KKN pada dasarnya dilakukan 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikut beberapa tahapan KKN di UIN Jakarta.

1. Survei

Diskusi dengan anggota kelompok secara internal serta ketua kelompok dalam satu desa kapan melakukan survei. Kelompok yang berada dalam satu desa bisa melakukan survei pertama secara bersamaan. Kemudian pelacakan literatur tentang desa yang akan disurvei. Bila desa tersebut pernah menjadi desa lokasi KKN-PpMM tahun sebelumnya, maka bacalah buku laporan kelompok KKN-PpMM di desa tersebut atau hubungi salah satu anggotanya agar mendapatkan gambaran awal tentang desa dimaksud. Gunakan perambah elektronik internet/ mesin pencari untuk menelusuri peta desa, video, gambar jalan (street view), berita tentang desa, laporan penelitian, serta buku-buku terkait. Sejumlah data angka bisa diunduh dari web kantor BPS di setiap kabupaten/ kota.

Kemudian membuat catatan ringkas hasil penelusuran di atas sebagai data awal untuk berdiskusi dengan anggota kelompok dan dosen pembimbing. Mendatangi PPM untuk meminta surat pengantar ke Desa dengan Lampiran Surat Rekomendasi Pelaksanaan KKN-PpMM 2016 dari Kesbangpol Kabupaten dan Lampiran Rekap Daftar Nama anggota kelompok. Bila Dosen Pembimbing sudah ditetapkan, meminta waktu untuk ketemu dan berdiskusi tentang apa saja yang harus dilakukan saat survei dan pembuatan program. Tawaran waktu agar selama survei berlangsung Dosen Pembimbing bisa ikut serta dalam 1 (satu) kali survei. Dosen pembimbing mengurus persoalan administrasi survei ke PPM.

Semua kelengkapan dokumen sebelum survei perlu disiapkan. Mengunduh Form isian 1-3 untuk diisi pada saat survei. Setiap form yang ada bisa diisi selama proses persiapan KKN berlangsung. Semua isian form diisi dalam dokumen word dan akan menjadi data lampiran dalam Buku Laporan Hasil KKN-PpMM 2016.

Survei pertama dilakukan pada saat hari kerja, sehingga bisa bertemu dengan pihak aparaturnya kecamatan dan desa serta bisa didapatkan informasi pembagian wilayah pengabdian setiap kelompok KKN di dalam satu desa. Tim pensurvei membawa alat tulis, perekam suara dan kamera untuk keperluan pencatatan dan dokumentasi selama survei dilakukan. Menemui aparat kecamatan atau desa adalah hal yang pertama kali harus dilakukan selama survei. Surat disampaikan kepada para pihak terkait dan didiskusikan apakah bisa bertemu langsung dengan Kepala Kecamatan (camat) atau Kepala Desa pada saat itu atau pada hari lain dengan kepastian janji waktu. Kemudian tanda terima penyampaian surat pengantar dari PPM agar menjadi bukti bahwa

kelompok saudara sudah melakukan kunjungan dan menginformasikan rekomendasi Kesbangpol Kabupaten/ kota pada kecamatan dan desa.

Normatifnya yang menyebarkan surat rekomendasi dari Kesbangpol Kabupaten/ Kota ke kecamatan adalah Kesbangpol Kab/ Kota. Hanya saja menghindari terjadinya keterlambatan penyampaian dan mis-komunikasi, maka penyampaian surat rekomendasi pelaksanaan KKN-PpMM 2016 dilakukan oleh PPM melalui mahasiswa yang berada di lokasi tersebut. Bagi kelompok yang menjadi koordinator kecamatan, dapat menginisiasi audiensi dengan Pak Camat agar bisa melakukan kegiatan se-kecamatan. Serta bisa membantu program kecamatan apa saja yang bisa disinkronkan dengan kegiatan KKN di desa-desa di wilayah kecamatan tersebut.

Mewawancarai sejumlah warga untuk mendapatkan gambaran umum desa, dusun, kampung yang akan menjadi lokasi pengabdian. Wawancara bisa dilakukan secara bertahap mulai survei pertama kali hingga survei dan observasi lokasi berikutnya. Di antara mereka yang harus dimintai pandangannya adalah: tokoh masyarakat, aparat desa, ustadz/guru sekolah, pengelola majelis taklim, pemuda, petani, dll. Membuat peta lokasi desa/ kampung bila tempat yang akan menjadi lokasi pengabdian sudah ditunjuk oleh fakultas dan disepakati bersama kelompok KKN-PpMM. Peta lokasi yang dibuat seperti denah yang pernah disampaikan dalam Pembekalan KKN pada materi "Berubah untuk Aksi, Beraksi untuk Berubah".

Membuat Sejarah Desa dengan Mengacu pada Form yang telah disediakan. Data ini akan berguna untuk kepentingan desa atau kampung tersebut dan menjadi salah satu bahan dalam Buku Laporan Hasil KKN-PpMM 2016. Semua dokumen yang dihasilkan dari survei didiskusikan di kelompok KKN bersama dosen pembimbing untuk menentukan program dan kegiatan apa saja yang memungkinkan bisa dilakukan oleh kelompok KKN-PpMM dan Program Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen (PpMD). Atas dasar dokumen ini pula dosen membuat proposal singkat untuk pencairan dana PpMD terintegrasi di Lokasi KKN.³

2. Pelaksanaan

Program kerja yang telah disusun, disiskusikan dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat serta telah menjadi matriks program kerja KKN, selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan.

Pada tahap ini hal yang amat penting yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat agar bersama-sama mahasiswa melaksanakan program kerja KKN. Dalam rangka pelaksanaan program KKN maka pendekatan sosial kepada warga masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan rasa kerendahan hati dan rasa kepercayaan pada sikap positif dan kemampuan warga masyarakat serta menghormati tradisi setempat.

Seluruh kegiatan pelaksanaan program yang telah direncanakan harus icatat setiap hari pada buku tugas harian (BTH) mahasiswa sesuai dengan

³ Eva Nugraha, *Panduan Untuk Survei Lokasi Kkn-Ppmm 2016* (Jakarta : Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) hlm. 1-2

format yang ada. Kerajinan dan ketelitian mengisi agenda harian dan matriks pelaksanaan program kerja akan memudahkan dalam pembuatan laporan KKN, sebab keduanya merupakan sumber utamanya. Mengingat pentingnya kedua perangkat tersebut, maka setiap kali DPL mengadakan bimbingan di lokasi harus selalu memeriksanya. Disamping itu, berdasarkan kedua perangkat tersebut, DPL dapat memantau hambatan dan kemajuan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

3. Laporan

Terdapat dua laporan yang dibuat mahasiswa KKN, yaitu laporan individu dan laporan kelompok. Laporan individu terdiri dari laporan mingguan (1-2-3-4) dan laporan tugas harian. Mahasiswa KKN, bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh panitia pelaksana KKN. Untuk laporan mingguan wajib diisi oleh masing-masing peserta sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Laporan mingguan dikumpulkan secara kolektif menurut kelompok yang bersangkutan. Laporan individual dibuat sebanyak 3 eksemplar dengan peruntukan DPL, ketua kelompok dan bagi yang bersangkutan.

Untuk laporan buku tugas harian mahasiswa KKN diisi oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN yang bersangkutan. Laporan catatan harian diserahkan kepada DPL sebagai salah satu bahan penilaian untuk masing-masing peserta.

Sedangkan laporan kelompok merupakan laporan akhir kegiatan yang disusun secara kolektif yang mencakup berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN di lokasi masing-masing. Laporan kelompok dibuat 3 eksemplar, yaitu untuk Pusat PPM, DPL dan lurah tempat KKN dilaksanakan.⁴

B. KKN di UIN Walisongo Semarang

Seperti halnya PTKIN lain, UIN Walisongo⁵ terus berupaya meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat baik dari kualitas, kuantitas bahkan juga pendanaan. Namun satu hal yang nampak berbeda dari PkM di UIN Walisongo adalah intensitas kegiatan KKN yang cukup variatif dan setiap semester dilaksanakan. Bahkan menurut Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ali Imran bahwa “pengabdian di UIN Walisongo melulu ngurus KKN”⁶

Menurut Kapus Pengabdian, selain program di atas, kegiatan KKN yang multi variatif merupakan bentuk tanggungjawab PT terhadap masyarakat. Dalam kegiatan KKN, setiap kecamatan desa-desanya terisi seluruhnya. Kelompok KKN memperoleh bantuan Rp. 500.000 untuk pergi ke desa.

⁴ Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Jakarta: LP2M UIN Syahid, 2011) hlm. 49-51

⁵ UIN Walisongo merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 tanggal 17 Oktober 2014.

⁶ Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo, 27 Juli 2016

Demikian pula dalam kegiatan KKN tersebut dikompetisikan program unggulan kelompok yang nantinya dinilai dan diberi *reward*.

KKN di UIN Walisongo sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat memiliki berbagai bentuk, yaitu

1. KKN Mandiri

KKN Mandiri adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan atau institusi internal UIN Walisongo.⁷ KKN Mandiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

a. KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT)

KKN Mandiri Inisiatif Terprogram atau disingkat dengan KKN-MIT merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon mahasiswa peserta KKN. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan atas persetujuan LP2M.

Dalam KKN-MIT, mahasiswa mengajukan perencanaan kegiatan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Walisongo. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang akan diberikan oleh mahasiswa. Mahasiswa menyusun proposal lengkap yang berisi program kerja KKN berikut kebutuhan biaya. LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa.

Program kerja KKN-MIT yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN-MIT dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya menjadi beban mahasiswa. Mahasiswa diberi keluasaan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

b. KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK)

KKN Mandiri Misi Khusus atau disingkat dengan KKN-MMK merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun atau diusulkan oleh

⁷ Anonimous, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata KKN Mandiri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. (Semaarang: LP2M UIN Walisongo, 2016) hlm. 2.

Selanjutnya, penjelasan teknis tentang KKN mandiri ini sebagian besar data diperoleh dari buku panduan tersebut selain juga diperoleh dari hasil wawancara.

institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit atau lembaga internal kampus lainnya) sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi misi UIN Walisongo.

KKN-MMK ini dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Walisongo dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Walisongo sebagai pengusul menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M UIN Walisongo. LP2M menyelenggarakan seminar proposal KKN-MMK untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal. Setelah proposal disetujui oleh LP2M kemudian pengusul mensosialisasikan ke civitas akademika UIN Walisongo.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan KKN-MMK dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara pro-porsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN-MMK. Pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap mendukung program KKN ini, dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

c. KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Walisongo berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LP2M.

Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua LP2M dengan melampirkan laporan lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya, berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung kegiatan. LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai *ad hoc* yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai pengganti KKN.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

2. KKN Reguler

KKN adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Waktu pelaksanaan KKN reguler dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yaitu Februari-Maret dan Juli-Agustus.⁸

C. KKN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing. Menurut Buku Panduan Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nama KKN UIN Yogyakarta adalah KKN Integrasi-Interkoneksi yang diimplementasikan dalam bentuk KKN Tematik.

Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksi berbagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Syarat mengikuti KKN adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan, mahasiswa telah lulus sekurang-kurangnya 110 sks atau 80% dari sks yang wajib ditempuh, mncantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS), tidak boleh mengambil mata kuliah lain, kecuali Skripsi/Tugas Akhir.

Pada tahun ajaran 2011/2012, KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-77 menggunakan sistem KKN Integrasi-Interkoneksi tematik Posdaya. Tematik Posdaya ini diamanatkan kepada mahasiswa untuk mensukseskan pencapaian pembangunan milenium (MDG's) tahun 2015. Adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Yayasan Damandiri bertujuan mengembangkan jaringan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan dan pedukuhan dalam bentuk Pos Pemberdayaan keluarga, yang disingkat POSDAYA.

Menurut Wildan, untuk tahun ini (2016) konsep pos daya ditiadakan, karena berkaca pada tahun lalu yang tidak sukses. Tidak semua desa cocok dengan konsep ini, yang mana berpaku pada keluarga-keluarga.⁹ Konsep KKN sekarang yakni integrasi-interkoneksi. "Pemberdayaan masyarakat menyesuaikan potensi-potensi yang ada di masyarakat dan tentunya mengutamakan kegiatan keagamaan. Pelaksanaan KKN dilakukan selama 30 hari, yang mana telah dilakukan survei selama seminggu sebelum hari

⁸ Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo, 27 Juli 2016

⁹ Wawancara dengan Wildan, Sekretaris LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016

penerjunan ke lapangan. Dari survei tersebut selanjutnya bisa membuat Rancangan Program Kerja (RKP).

Waktu yang hanya 30 hari menurut ketua LP2M, Fatiimah bahwa secara hitungan akademik itu sudah memenuhi 4 SKS. "Sudah dikonsultasikan kepada pihak untuk porsi proker sendiri tentu menjadi berkurang, totalnya enam, yakni empat proker untuk kelompok, dua proker individu.

Selain itu, di UIN Yogyakarta dilakukan KKN semester pendek angkatan 89, sejumlah 1222 mahasiswa telah diterjunkan ke masyarakat sejak tanggal 20 Juni 2016 yang berlokasi di Kulonprogo. Dengan pembagian wilayah antara lain Galur, Kokap, dan Kalibawang. Periode angkatan 90 akan diterjunkan sebanyak 1500 mahasiswa pada tanggal 20 Juli 2016 yang berlokasi di Gunung Kidul dan Sleman. Untuk pembagian daerah yang akan ditempati untuk yang berlokasi di Gunung Kidul antara lain Panggang dan Saptasari, dan yang berlokasi di Sleman bertempat di Turi dan Pakem.¹⁰

Dengan mengacu pada buku panduan KKN UIN Kalijaga Yogyakarta diperoleh penjelasan bahwa KKN di UIN Yogyakarta terdiri dari beberapa bentuk, yaitu :¹¹

1. KKN Reguler

KKN reguler dilaksanakan secara rutin pada setiap gasal, genap dan semester pendek dengan ketentuan dan persyaratan umum. Adapun KKN reguler ini dibagi ke dalam dua macam, yaitu integrasi-interkoneksi dan Posdaya Berbasis masjid.

a. KKN Integrasi-Interkoneksi

Jenis atau model KKN reguler integrasi-interkoneksi memiliki beberapa prinsip. *Pertama, co-integration-interconnection* (pemaduan-pengaitan bersama), yang dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang merupakan gagasan pemaduan-pengaitan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, prodi) dengan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat.

Kedua, co-sinergy (sinergi bersama), yang dilaksanakan dengan mensinergikan sumber daya manusia, sumber dana bersama, dan segala potensi yang ada antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat disesuaikan dengan tema program yang telah disepakati bersama.

Ketiga, intensive cooperation (kerjasama intensif), yang dilaksanakan dengan *win-win solution* intensif antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat di lokasi setempat.

Keempat, sustainability (berkesinambungan), yang dilaksanakan secara terus-menerus berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat lokasi KKN dan target tertentu.

¹⁰ Wawancara dengan Fatimah, Ketua LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016

¹¹ Anonimous, *KKN Integrasi Interkoneksi*. (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm 23-44

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka aktivitas perkuliahan mahasiswa di lapangan dalam bentuk pengabdian untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan SD G's (*Sustainable Development Goals*). Bentuk kegiatan ini mengintegrasikan dan menginterkonesikan antar-kedua kegiatan KKN-LPM yang dilakukan mahasiswa dengan pemanfaatan dan pengalaman IPTEKS sesuai dengan Pancasila.

b. KKN Posdaya Berbasis Masjid

Pos pemberdayaan masyarakat (Posdaya) pada prinsipnya hendak memperkuat fungsi-fungsi keluarga agar setiap keluarga memiliki ketahanan lahir batin dalam menopang tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Posdaya dengan demikian adalah lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk keluarga serta masyarakat.

Posdaya bukan lembaga pesaing atau pengganti lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, melainkan forum untuk mengembangkan kegiatan yang terpadu dan dinamis, memberdayakan keluarga agar tanggap, berani mengambil prakarsa dan bekerja keras dalam pembangunan dengan partisipasi yang lebih merata. Dalam arti yang lebih sempit, Posdaya merupakan forum gotong royong untuk memperkuat fungsi keluarga dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Posdaya memiliki banyak basis, di antaranya adalah masjid yang menyimpan potensi besar sebagai pusat gerakan masyarakat, umat muslim pada umumnya. Indikator ini dapat diperhatikan pada pengembangan peran dan fungsi masjid sebagaimana era Rasulullah, antara lain: *pertama*, pusat pendidikan seumur hidup; *kedua*, medan budaya untuk menyegarkan modal sosial dalam kontribusinya membangun peradaban; *ketiga*, penggalangan sumber dana masyarakat lebih akuntabel dan transparan; *keempat*, media mobilisasi umat untuk dakwah dalam berbagai bentuknya; *kelima*, sarana membangun komunikasi intensif dalam relasi sosial para jama'ahnya melalui waktu shalat, serta menjadi pusat pemecahan masalah umat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengentasan kemiskinan.

Tujuan pembentukan dan pengembangan Posdaya berbasis masjid melalui KKN dibangun dari kehendak untuk mengintegrasikan gagasan pemakmuran masjid dan mengembalikan fungsi masjid sebagaimana zaman Rasulullah sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan berbagai kepentingan jamaah dengan tujuan kemaslahatan. Mahasiswa berperan sebagai kelompok pendamping masyarakat dengan posisi kemitraan bersama jamaah.

Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Posdaya berbasis masjid ini didasifikasi dalam lima kelompok keluarga sejahtera, yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera (PS): apabila kondisi keluarga tidak memenuhi semua unsur criteria Keluarga Sejahtera I (KS) apabila kondisi keluarga memenuhi semua 6 unsur berikut:

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan di rumah, untuk bekerja, sekolah dan bepergian;
 - c) Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik;
 - d) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan (bukan dukun/tabib);
 - e) Apabila pasangan subur (usia istri 15-49 tahun) ingin ber-KB pergi ke sarana kesehatan;
 - f) Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah.
- 2) Keluarga Sejahtera II (KS 2): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS 1 ditambah dengan 8 unsur berikut:
- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - b) Seluruh anggota keluarga makan daging/teludikan, paling kurang seminggu sekali;
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh pakaian baru, paling kurang satu stel dalam setahun;
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk setiap (1 orang) penghuni rumah;
 - e) Tiga bulan terakhir, semua anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing;
 - f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
 - g) Seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulisan latin;
 - h) Pasangan usia subur (usia istri 15-49 tahun) dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi KB.
- 3) Keluarga Sejahtera III (KS 3): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS 1 dan memenuhi 8 unsur KS 2 serta ditambah dengan semua 5 unsur berikut:
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam **bentuk** uang atau barang;
 - c) Ada waktu bersama segenap anggota keluarga untuk komunikasi, paling kurang seminggu sekali, misalnya makan bersama, nonton bersama, jalan-jalan bersama, dan lain-lain;
 - d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, TV, radio, dan media elektronik lainnya;
- 4) Keluarga Sejahtera III plus (KS 3+): apabila kondisi keluarga memenuhi 6 unsur KS1, memenuhi 8 unsur KS 2, dan memenuhi 5 unsur KS 3 serta ditambah dengan 2 unsur, yaitu:
- a) Keluarga secara teratur dan sukarela (bukan iuran wajib) memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial.

- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

2. KKN Non-reguler

KKN non-reguler dilaksanakan tidak berdasarkan kalender akademik semester pendek atau masa liburan, tetapi dapat dilaksanakan oleh mahasiswa saat kegiatan aktif kuliah, atau dengan kata lain, mahasiswa dapat melaksanakan KKN sambil mengikuti kuliah reguler pada umumnya. Adapun KKN Non-reguler ini dibagi ke dalam empat macam, yaitu Mandiri, Tematik, Mandiri Konversi, dan Internasional.

Adapun ketentuan syarat secara khusus sebagai berikut:

- a. Jumlah mahasiswa 10-12 orang perkelompok,
- b. Membentuk kelompok dan termasuk menentukan lokasi serta mengusulkan DPL sendiri,
- c. Mahasiswa telah mempunyai program kegiatan untuk KKN berupa proposal,
- d. Anggota kelompok terdiri dari (minimal) 2 fakultas dan 3 prodi;
- e. Dapat dilakukan oleh perseorangan atau kurang dari 10 orang pada jenis KKN Mandiri Konversi dan KKN Internasional.

1) KKN Mandiri

KKN Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang diinisiasi sendiri oleh mahasiswa, baik waktu maupun program kegiatannya. KKN Mandiri ini, dengan kata lain, program kegiatan dan waktu volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon peserta KKN dengan bimbingan DPL dan atas persetujuan LP2M.

Secara umum, prosedur yang harus dilakukan adalah mahasiswa mengajukan perencanaan kegiatan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut kebutuhan dananya. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang telah direncanakan oleh mahasiswa.

LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KKN Mandiri yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN Mandiri dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya dari mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan DPL atau LP2M.

2) KKN Tematik

KKN Tematik merupakan KKN Mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun dan diusulkan oleh institusi internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau berdasarkan permintaan khusus dari sebuah lembaga, sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi-misi kampus.

KKN Tematik dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Sunan Kalijaga sebagai pengusul atau menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M. Pihak LP2M kemudian menyelenggarakan seminar proposal KKN Tematik untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal.

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN Tematik dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara proporsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN Tematik dan mahasiswa secara proporsional. Artinya, pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap mendukung program KKN jenis ini.

3) KKN Mandiri-Konversi

KKN Mandiri Konversi atau disingkat KKN -MK merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga dan dapat diakui serta disamakan dengan kegiatan KKN reguler. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan, kegiatan bela negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Sunan Kalijaga berdasarkan rekomendasi dari tim penilai *ad hoc* yang ditunjuk oleh LP2M. Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada rektor c.q. Ketua LP2M dengan melampirkan laoran lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya, nilai dari penyelenggara (jika ada), berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung.

4) KKN Internasional

KKN internasional merupakan jenis KKN “rintisan baru” di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang jika dilihat dari lokasi pengabdian, tidak di daerah dalam negeri, tetapi justru di luar negeri. Bentuk-bentuk pengabdian ini tentu saja tidak sebagaimana dilakukan model KKN yang lazim dilaksanakan di dalam negeri, tetapi bisa melalui kegiatan-kegiatan khusus, seperti sebagai

relawan kemanusiaan di negara konflik atau aktivitas dakwah sebagai penceramah dalam waktu tertentu secara *continue* dan telah memenuhi syarat jangka waktu KKN selama 30 hari.

Secara umum, KKN ini mirip dengan jenis KKN non reguler tematik, tetapi ada beberapa perbedaan. KKN Internasional tidak dilaksanakan secara mandiri berdasarkan pengajuan proposal dari peserta atau mahasiswa tetapi sudah terprogram dengan jalinan tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan KKN internasional.

Berdasarkan gambaran di atas, khusus tentang bentuk kegiatan KKN, pada beberapa PTKIN sejumlah jenis KKN sangat begitu variatif yakni jenis KKN-nya sudah lebih dari 2, yaitu KKN Reguler, KKN Mandiri (KKN mandiri inipun lebih banyak lagi variasinya), KKN Tematik Posdaya dan KKN Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sudah mulai nampak terlihat variasinya. Namun demikian, jika menoleh ke samping di PTN lingkungan Kemenristekdikti, jenis pengabdian kepada mahasiswa sudah lebih maju karena selain cakupan program dan sarannya, juga tersedia anggaran bagi mahasiswa yang memadai secara kompetitif dengan nama program KKN-PPM bagi Perguruan Tinggi di Indonesia.¹²



¹² Anonimous, *Panduan pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. (Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada , Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016). Hlm. 517

BAB IV SIKLUS KKN SISDAMAS

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Konsep mengenai kekuasaan merupakan ide utama dalam hal pemberdayaan. Kekuasaan sendiri selalu diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Adanya kerja sama yang saling berkesinambungan dan melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga proses *empowerment* bisa berjalan.³⁸

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan—atau setidaknya diserupakan—dengan istilah pengembangan.³⁹ Konsepsi pengembangan sebagai pemberdayaan didasarkan pada penguatan kualitatif yang dilakukan fasilitator kepada kelompok atau komunitas masyarakat.

Definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung,
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang dipengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya,
3. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial,
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau menjadikan sebagian kekuatan, kekuasaan pada masyarakat bersangkutan agar lebih berdaya (*survival of the fittes*) dan menekankan pada proses stimulus, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan akan keberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

³⁸ Harry Hikmat, "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*," (Bandung: Humaniora Utama Press, 2006), cet. IV.

³⁹ Agus Ahmad Safei dan Nani Machendrawati *Pengemangan masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003).

paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”⁴⁰

People centered merupakan tatanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat. Konsepsi *people centered* ini relevan dengan ruh demokrasi yang juga mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan setiap harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Tentunya, proses tersebut akan sulit dilakukan tanpa cara-cara tertentu bahkan metodologi tertentu. Oleh karena itu *empowering* menjadi mutlak dilakukan sebagai perangkat metode-metode yang dapat memudahkan masyarakat dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep *people centered, participatory* dan *empowering* itu diketahui, dipahami dan tersosialisasikan secara merata kepada masyarakat, maka dalam paradigma baru pembangunan juga mensyaratkan *sustainability* atau keberlanjutan proses dalam setiap ruang dan waktu. Pada proses ini, masyarakat akan melakukan pembangunan melalui siklus program yang pada proses pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan tertentu yang dirancang secara *sustainable*.

Pada kenyataannya proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dan bahkan pada negara yang menganut *theisme* akan mengembalikan pada nilai-nilai ketuhanan atau dalam konsep Islam disebut sebagai nilai-nilai ilahiyah.

Goals atau tujuan pemberdayaan seringkali ditujukan untuk mengangkat orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Padahal lebih daripada itu, pemberdayaan bertujuan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dengan kata lain pemberdayaan adalah proses pendidikan secara terbuka dalam kehidupan bermasyarakat yang berujung pada upaya memanusiaikan manusia. Adapun secara khusus, yang menjadi tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Adapun pengelompokan yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

⁴⁰ Mohammad Jafar Hafsa, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Iris Press, 2008).

Namun pemberdayaan kelompok lemah tersebut tetap bukan tujuan utama, karena dalam konteks pemberdayaan mutlak untuk melibatkan seluruh komponen untuk turut berpartisipasi menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Sehingga, kemiskinan, kebodohan, masyarakat marginal dan sebagainya hanya menjadi pemicu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian perubahan paradigma yang perlu dibangun dalam memahami tujuan pemberdayaan dimulai dari karakteristik masyarakat berdaya. Sebagaimana telah disampaikan pembahasan awal bahwa pemberdayaan atau *empowerment/empowering* adalah proses penguatan masyarakat dengan cara mendorong (motivasi), menjembatani (fasilitasi dan mediasi), serta mendampingi (advokasi) dalam meraih tujuan-tujuan yang baik di masyarakat. Dalam konteks agama, perubahan sosial masyarakat daya merupakan misi dakwah, pemberdayaan umat Islam disebut sebagai *tamkiinu al-Dakwah* yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kepedulian dan kemauan yang keras.

Contoh yang paling sederhana menggambarkan sosok sederhana dari masyarakat berdaya adalah seperti Mak Eroh Tasikmalaya, seorang nenek yang tidak pantang menyerah walaupun sudah berulang kali mengusulkan kepada pemerintahan setempat agar berupaya mencanangkan program pengadaan saluran air irigasi agar dapat menanggulangi *paceklik* di musim kemarau karena kurangnya respon pemerintah saat itu, mak Eroh kemudian bersama segelintir keluarga dan masyarakat yang peduli saat itu menggali saluran air yang cukup panjang dan menembus gunung dengan membuat terowongan air hingga air pun mengalir sampai jauh. Dengan upaya ini mak Eroh dikemudian hari oleh pemerintah Orde Baru saat itu diberikan penghargaan berupa Kalpataru pada tahun 1988. Mak Eroh tidak meminta tarif atau bayaran sedikitpun dari masyarakat dan pemerintah walaupun kondisi ekonominya lemah sawah yang diairi dari salurannya pun tidak luas, tetapi masyarakat mendapatkan manfaat dari segala upaya yang dilakukan Mak Eroh.

Mak Eroh adalah sosok manusia berdaya yang karakteristiknya peduli terhadap lingkungan dan sesama, responsif terhadap penanggulangan masalah dan eksistensinya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Maka kategorisasi berikut merupakan deskripsi dari asumsi keberdayaan masyarakat:

Miskin Berdaya	Kaya Berdaya
Miskin Tidak Berdaya	Kaya Tidak Berdaya

Dengan demikian dapat dipahami bahwa paradigma pemberdayaan yang sebelumnya banyak dipersepsi syarat dengan kemiskinan maka perlu ada

kesamaan pandangan yang komprehensif bahwa kemiskinan ≠ tidak berdaya dan kaya ≠ berdaya. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan adalah segala upaya untuk mewujudkan masyarakat miskin yang berdaya dan masyarakat yang kaya tapi berdaya.

Arah pemberdayaan diharapkan tepat pada sasaran yang dimulai dari kemiskinan dan simbol-simbol ketidakberdayaan lainnya. Sasaran pemberdayaan dilihat dari segi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Kemiskinan, yaitu penduduk Indonesia yang termasuk kategori fakir miskin;
2. Ketelantaran, yaitu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang melanda anak-anak, perempuan dan lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
3. Kecacatan baik cacat secara fisik ataupun cacat secara mental;
4. Ketuna-sosialan, yaitu kondisi disharmonisasi dengan nilai susila dan sosial budaya yang umum berlaku di masyarakat;
5. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

Jika kajian pemberdayaan dimulai dari kemiskinan, Sennet dan Cabb dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, arena politik, akses terhadap informasi, dukungan finansial, pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik atau emosional.⁴¹ Hal ini dapat menjadi titik tolak untuk menggugah kesadaran si miskin atau kaum marginal (*mustadh'afiin*) dan si kaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan.

Proses penguatan untuk perubahan tatanan masyarakat yang maju (madani) dalam konteks pemberdayaan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan melakukan tahapan-tahapan proses pemberdayaan. Tahapan-tahapan tersebut dinamakan dengan siklus pemberdayaan masyarakat. Adapun siklus pemberdayaan masyarakat tersebut dilatihkan dan diajarkan dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Sosialisasi Awal dan Rembug Warga (Soswal dan RW)

Merupakan proses awal dalam siklus KKN Sisdamas. Siklus ini dilaksanakan karena KKN Sisdamas merupakan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial yang diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak KKN Sisdamas sebagai alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu RW merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya sendiri.

Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima KKN Sisdamas, maka

⁴¹ Shamdan, Agus, " *Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Aspek Ketahanan Sosial Masyarakat*," (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004)

secara otomatis masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan masalah sosial dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh KKN Sisdamas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dalam daur penanggulangan masalah sosial secara partisipatif yang dijawantahkan dalam tahapan siklus-siklus selanjutnya.

Komitmen yang disepakati oleh masyarakat berimplikasi kepada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh mereka seperti: mengikuti pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan setiap proses tahapan siklus, adanya motor penggerak yang bekerja dengan sukarela, kesediaan untuk bekerjasama dari berbagai pihak (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda aparat pemerintah setempat, dll), menyediakan dana swadaya untuk berbagai pertemuan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dengan mengetahui segala konsekuensi yang harus dihadapi diharapkan masyarakat betul-betul siap untuk menerima intervensi KKN Sisdamas bukan karena 'iming-iming' bantuan dana akan tetapi karena benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan upaya penanggulangan masalah sosial secara bersama-sama.

Secara hirarki Soswal & RW dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat basis-basis sosial masyarakat paling bawah.

1. Soswal & RW Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat Kabupaten/ Kota sosialisasi dilakukan oleh pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam hal rektor dan para dekan dan atau wakil rektor bidang kerjasama beserta para wakil dekan bidang kerjasama difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) bersama Bupati/ Walikota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perwakilan tokoh agama, camat dan atau pejabat berwenang yang secara teknis dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tiap kecamatan serta stakeholder lainnya yang dipandang berkepentingan pada KKN Sisdamas.

Secara teknis kegiatan sosialisasi dimulai secara formal antara kedua lembaga dengan bukti dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) dan daftar hadir pertemuan dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi (*opening ceremony*) sesuai jadwal yang ditetapkan kedua pihak.

2. Soswal & RW Tingkat Desa

Persiapan desa adalah tahap yang sangat penting untuk kelancaran proses pelaksanaan kajian. Persiapan sebenarnya sudah diawali dengan proses sosialisasi. Dengan persiapan ini diharapkan bahwa masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (melalui PRA). Selain itu, persiapan dapat juga melahirkan suatu kepercayaan (*trust*), keterbukaan dan suasana akrab di antara masyarakat dan Dosen Pembimbing Lapangan serta peserta KKN.

Salah satu tahap dalam sosialisasi adalah penyusunan rencana kegiatan sosialisasi konsep KKN Sisdamas. Dalam rencana tersebut menyangkut tentang kesepakatan mengenai:

a. Tempat

Biasanya masyarakat sendiri mengatur penyediaan tempat tersebut. Yang perlu diperhatikan meliputi:

- 1) Luasnya tempat (cukup luas untuk semua peserta seperti gedung serbaguna desa atau masjid)
- 2) Tempat sesuai kondisi cuaca
- 3) Tempat mudah dicapai untuk masyarakat serta peserta KKN

b. Waktu

Waktu pelaksanaan sosialisasi awal dan rebug warga disepakati bersama masyarakat. Biasanya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan sepanjang hari karena harus kerja kebun atau kerja lain.

Pelaksanaan KKN Sisdamas membutuhkan banyak waktu dan perlu kesabaran masyarakat dan fasilitator. Kajian Keadaan Pedesaan terdiri dari lebih dari pada satu kegiatan dan perlu beberapa pertemuan dengan masyarakat. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan keadaan setempat dan keinginan masyarakat.

c. Pengumuman / Undangan

Rencana pelaksanaan perlu diingatkan kepada masyarakat supaya masyarakat, termasuk yang tidak sempat hadir pada saat sosialisasi, akan mengikuti kegiatan pemberdayaan. Perlu diingatkan bahwa perempuan juga perlu terlibat dalam kegiatan kajian sebagaimana amanat Millenium Development Goal's (MDG's) yang berlanjut pada isu Sustainable Development Goal's (SDG's) yang mengharuskan partisipasi 30% kaum perempuan. Sering kali masalah-masalah yang diangkat kurang peka terhadap kebutuhan perempuan dan terlalu memperhatikan pria.

Adapun media sosialisasi dilakukan dengan cara formal dan non formal. Secara formal, pemerintahan desa memfasilitasi pembuatan, penggandaan dan penyebarluasan informasi kepada seluruh warga desa tentang agenda rebug warga desa. Secara informal, dapat diumumkan pada kegiatan-kegiatan masyarakat melalui pengeras suara di masjid atau balai desa, sisipan pengumuman pada saat kegiatan pengajian, *tahlilan*, kegiatan PKK dan lain-lain. Pemanfaatan media sosial digital pun sangat mungkin dilakukan seperti facebook, WA, instagram atau media sosial konvensional seperti majalah dinding.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan rebug warga dapat dikemas dalam berbagai variasi, baik dilaksanakan di dalam ruangan (*in door*) maupun di luar ruangan (*out door*). Acara dipandu oleh perangkat desa sebagai pemangku kepentingan utama, sambutan kepala desa dan DPL. Kemudian DPL menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peserta KKN untuk belajar bersama masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan dilanjut dengan penawaran penyepakatan konsep

KKN Sisdamas yang mensyaratkan pelaksanaan siklus oleh masyarakat bersama peserta KKN.

Bukti penyepakatan ini berupa Berita Acara, daftar hadir dan dokumentasi lainnya yang dipandang penting. Pada kegiatan ini juga berorientasi pada output dan outcome berupa kehadiran para relawan dari masyarakat yang siap menjadi duta pemberdayaan di tingkat basis masing-masing. Pada momentum sosialisasi dan rembug warga ini bisa secara paralel dilaksanakan siklus berikutnya yaitu refleksi sosial.

3. Soswal & RW Tingkat basis/ komunitas

Sebagaimana soswal & RW ditingkat desa, pada tingkat RW dan RT serta komunitas tinggal melanjutkan sosialisasi dengan berbagai media sosialisasi yang ada di masyarakat. Berita acara, daftar hadir dan dokumen hasil penyepakatan diperbanyak oleh relawan disetiap RW, RT dan komunitas.

Setelah kegiatan ini selesai, pemandu menawarkan kepada peserta untuk menyusun rencana kerja tindak lanjut kepada masyarakat secara tertulis dalam Berita Acara.

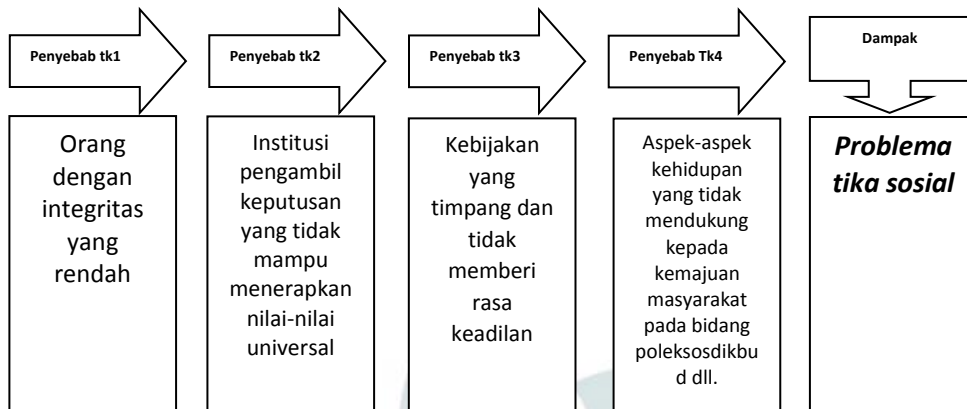
B. Refleksi Sosial (Refso)

Refleksi Sosial dapat dilakukan secara paralel dengan Sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai 'objek' seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh 'Orang Luar'). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak 'Orang Luar' atau karena tergiur dengan 'iming-iming' bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.

Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Sosial, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir, sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.

1. Olah Pikir. Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan Sosial yang dihadapi masyarakat, untuk membuka mekanisme-mekanisme yang selama ini sering tidak tergalikan dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan Sosial sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal-hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan Sosial yang sebenarnya. Setiap kondisi, baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab Sosial yang berakar pada

luntarnya nilai-nilai kemanusiaan seperti dapat dilihat dalam bagan berikut:



2. Olah Rasa adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan Sosial. Upaya olah rasa lebih menyentuh 'hati' masing-masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan Sosial dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai luhur manusia (memanusiakan manusia). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang berdaya adalah 'Manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia'.

Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada:

1. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan;
2. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat;
3. Tumbuhnya kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri;
4. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu, pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama-sama menanggulangi masalah Sosial (baca: untuk kesejahteraan masyarakat).

Proses olah pikir dan olah rasa ini dapat dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT) ditingkat basis atau komunitas yang dipandu oleh duta pemberdayaan atau relawan tingkat basis.

Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dilakukan secara paralel pada saat rebug warga atau tersendiri bersama masyarakat tingkat basis. Ada tiga hasil yang diharapkan dalam DKT refleksi sosial ini yaitu:

- a. Menemukan akar dari berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat hingga pada kesimpulan tertulis;
- b. Menemukan indikator-indikator masalah sosial, seperti apa indikator kemiskinan atau indikator pernikahan dini dan sebagainya;
- c. Penyampaian harapan dari masyarakat ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah dan penyampaian harapan dari pemerintah ke masyarakat serta harapan pemerintah kepada pemerintah. Kegiatan ini akan lebih terbuka dan efektif apabila dilakukan secara tertulis oleh warga dengan instrumen yang dapat disediakan oleh fasilitator.

Dalam DKT ini, fasilitator dapat menggunakan teknik wawancara dengan menyampaikan pertanyaan dan pernyataan kritis. Berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan analisa, namun tetap arahkan masyarakat agar terbangun keasadaran kritis, bukan kesadaran naif atau magis.

C. Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial (*social mapping*) didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau "pembuatan profile suatu masyarakat".

Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat yang oleh Twelvetrees (1991:1) didefinisikan sebagai "*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*" Sebagai sebuah pendekatan, pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu penelitian sosial dan geografi. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu image mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial, misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar, yang ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatannya.

1. Peran DPL, Mahasiswa dan Masyarakat

Untuk menerapkan pemetaan sosial pada KKN Sisdamas perlu dibentuk tim pemandu yang terdiri dari relawan, DPL dan peserta KKN dengan pembagian tugas dalam tim untuk masing-masing. Adapun tugas tim meliputi:

- a. **Pemandu diskusi / fasilitator utama.** Peran bertugas membangun proses diskusi, mendorong masyarakat untuk berdiskusi di antara mereka sendiri serta berbagi pengalaman;
- b. **Pemerhati proses.** Peran ini bertugas untuk mendampingi dan membantu fasilitator utama dalam memperlancar kegiatan serta menjaga proses agar tujuan akan tercapai. Dia melibatkan peserta pasif dan mengatasi peserta yang terlalu dominan (dengan cara yang halus)
- c. **Pencatat proses.** Peran ini bertugas melakukan pencatatan sebagai dokumentasi proses dan hasil diskusi secara lengkap dan obyektif;
- d. **Penerjemah.** Penerjemah diperlukan untuk membantu anggota tim yang tidak menguasai bahasa daerah setempat.

2. Pemetaan Kebutuhan, Masalah dan Potensi

Langkah-langkah penjajagan kebutuhan adalah:

- a. Pengenalan masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat
- b. Pengkajian hubungan sebab-akibat masalah masalah (identifikasi akar masalah)
- c. Pengkajian potensi lokal dan luar.
- d. Penetapan prioritas masalah berdasarkan kriteria masyarakat (antara lain: sifat mendesaknya, dan ketersediaan potensi masyarakat/ sumberdaya)

Kerangka untuk memahami masyarakat akan berpijak pada karya klasik Warren (1978), *The Community in America*, yang dikembangkan kemudian oleh Netting, Kettner dan McMurtry (1993:68-92). Kerangka pemahaman masyarakat dan masalah sosial terdiri dari 4 fokus atau variabel dan 9 tugas, yaitu:

Focus A: Pengidentifikasian Populasi Sasaran

Tugas 1: Memahami karakteristik anggota populasi sasaran

- a. Apa yang diketahui mengenai sejarah populasi sasaran pada masyarakat ini?
- b. Berapa orang jumlah populasi sasaran dan bagaimana karakteristik mereka?
- c. Bagaimana orang-orang dalam populasi sasaran memandang kebutuhan-kebutuhannya?
- d. Bagaimana orang-orang dalam populasi sasaran memandang masyarakat dan kepekaannya dalam merespon kebutuhan-kebutuhan mereka?

Focus B: Penentuan Karakteristik Masyarakat

Tugas 2: Mengidentifikasi batas-batas masyarakat.

- a. Apa batas wilayah geografis dimana intervensi terhadap populasi sasaran akan dilaksanakan?
- b. Dimana anggota-anggota populasi sasaran berlokasi dalam batas wilayah geografis?
- c. Apa hambatan fisik yang ada dalam populasi sasaran?

- d. Bagaimana kesesuaian batas-batas kewenangan program-program kesehatan dan pelayanan kemanusiaan yang melayani populasi sasaran?

Tugas 3: Menggambarkan masalah-masalah sosial

- a. Apa permasalahan sosial utama yang mempengaruhi populasi sasaran pada masyarakat ini?
- b. Adakah sub-sub kelompok dari populasi sasaran yang mengalami permasalahan sosial utama?
- c. Data apa yang tersedia mengenai permasalahan sosial yang teridentifikasi dan bagaimana data tersebut digunakan di dalam masyarakat?
- d. Siapa yang mengumpulkan data, dan apakah ini merupakan proses yang berkelanjutan?

Tugas 4: Memahami nilai-nilai dominan

- a. Apa nilai-nilai budaya, tradisi, atau keyakinan-keyakinan yang penting bagi populasi sasaran?
- b. Apa nilai-nilai dominan yang mempengaruhi populasi sasaran dalam masyarakat?
- c. Kelompok-kelompok dan individu-individu manakah yang menganut nilai-nilai tersebut dan siapa yang menentangnya?
- d. Apa konflik-konflik nilai yang terjadi pada populasi sasaran?

Focus C: Pengakuan Perbedaan-Perbedaan

Tugas 5. Mengidentifikasi mekanisme-mekanisme penindasan yang tampak dan formal (jika ada).

- a. Apa perbedaan-perbedaan yang terlihat diantara anggota-anggota populasi sasaran?
- b. Apa perbedaan-perbedaan yang terlihat antara anggota populasi sasaran dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat?
- c. Bagaimana perbedaan-perbedaan populasi sasaran dipandang oleh masyarakat yang lebih besar?
- d. Dalam cara apa populasi sasaran tertindas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut?
- e. Apa kekuatan-kekuatan populasi sasaran yang dapat diidentifikasi dan bagaimana agar kekuatan-kekuatan tersebut mendukung pemberdayaan?

Tugas 6. Mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi(jika ada)

- a. Adakah hambatan-hambatan yang merintang populasi sasaran dalam berintegrasi dengan masyarakat secara penuh?
- b. Apa bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh populasi sasaran dalam masyarakat?

Focus D: Pengidentifikasian Struktur

Tugas 7. Memahami lokasi-lokasi kekuasaan.

- Apakah sumber-sumber utama pendanaan (baik lokal maupun dari luar masyarakat) bagi pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang dirancang bagi populasi sasaran dalam masyarakat?
- Adakah pemimpin-pemimpin kuat dalam segmen pelayanan kesehatan dan kemanusiaan yang melayani populasi sasaran?
- Apakah tipe struktur kekuasaan yang mempengaruhi jaringan pemberian pelayanan yang dirancang bagi populasi sasaran?

Tugas 8. Menentukan ketersediaan sumber.

- Apakah lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada saat ini yang dipandang sebagai pemberi pelayanan bagi populasi sasaran?
- Apakah sumber utama pendanaan pelayanan-pelayanan bagi populasi sasaran?
- Apakah sumber-sumber non-finansial yang diperlukan dan tersedia?

Tugas 9. Mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan.

- Apakah kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi yang mendukung dan memberikan bantuan terhadap populasi sasaran?
- Bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh interaksi di dalam masyarakat?
- Bagaimana distribusi sumber bagi populasi sasaran dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan masyarakat ekstra?

Untuk memvisualisasi dan memudahkan analisis pemetaan, 'orang luar' dan 'orang dalam' dapat bersama-sama menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Teknik 1: Pemetaan (Mapping)

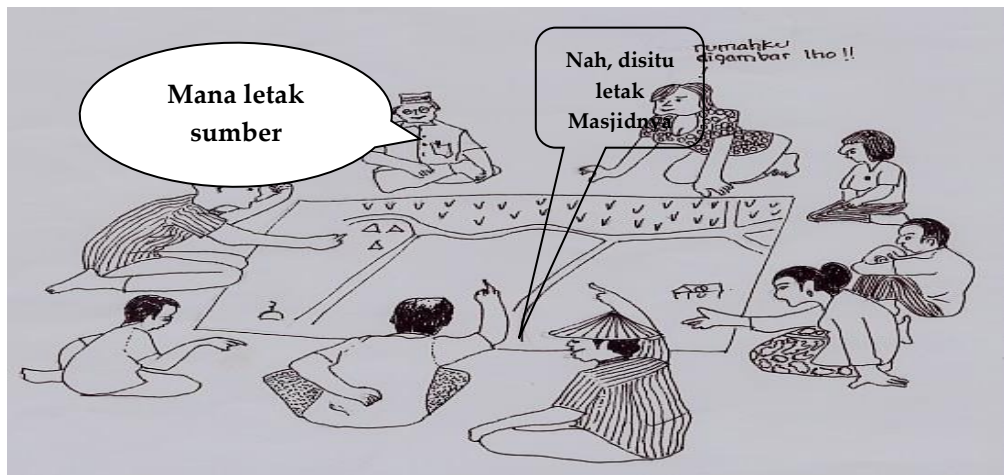
Pemetaan desa adalah menggambar kondisi wilayah (desa, dusun, RT, atau wilayah yang lebih luas) bersama masyarakat. .

Teknik *PRA* ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya sendiri. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumberdaya umum desa atau peta dengan topik tertentu (peta topikal), sesuai kesepakatan dan tujuannya, misalnya 'peta pemeluk agama Islam', 'peta penyebaran Islam'. Teknik ini banyak digunakan dan mengarah kepada teknik-teknik lain

Bagaimana Melakukan Pemetaan?

Pemetaan dapat dilakukan di atas tanah atau di atas kertas. Sering kali dipakai simbol-simbol dan peralatan yang sederhana seperti tongkat, batu-batuan dan biji-bijian. Keuntungan pemetaan dibuat di atas tanah adalah luasnya peta yang

tidak terbatas dan banyak orang dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Tetapi, kalau digambar di tanah, hasilnya harus digambar kembali atas kertas agar hasilnya tidak hilang.



Langkah-langkah melakukan Pemetaan:

- Sepakatilah tentang topik peta (umum atau topikal) serta wilayah yang akan digambar. Misalnya, topic tentang “peta agama Islam di desa Mutiara Terpendam”.
- Sepakatilah tentang simbol-simbol yang akan digunakan. Misalnya, rumah menggunakan daun, sungai menggunakan garis tebal, dsb.
- Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.
- Gambarlah (bersama masyarakat!!) batasan-batasan wilayah dan beberapa titik tertentu (misalnya jalan, sungai, rumah ibadah, sekolah, pasar, kantor desa).
- Ajaklah masyarakat untuk melengkapi peta dengan detail-detail sesuai topik peta (umum atau topikal).
- Diskusikan lebih lanjut bersama masyarakat tentang keadaan, masalah-masalah, sebabnya serta akibatnya
- Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dibahas dalam diskusi.
- Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai peta masyarakat).

b. Teknik 2: Kalender Musim (Seasonal Calendar)

Kehidupan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh pola atau daur kegiatan yang sama dan berulang dalam siklus waktu tertentu. Misalnya pada masyarakat pedesaan kehidupan sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh musim-musim yang berkaitan dengan aktivitas pertanian seperti musim tanam, musim

panen, musim hujan dan musim kemarau. Pada masyarakat perkotaan jenis musim yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat mungkin agak berbeda misalnya musim buah, musim hari besar, musim tahun ajaran baru dan sebagainya. Selain itu ada juga daur kegiatan yang bisa dikatakan sellau berulang dalam kedua macam masyarakat baik di desa maupun di kota misalnya musim penyakit tertentu, musim perkawinan dan sebagainya.

Dengan mengenali dan mengkaji pola-pola ini maka kita akan dapat memperoleh gambaran yang cukup memadai untuk penyusunan suatu program bagi masyarakat. Upaya menggali informasi yang berhubungan dengan siklus musim ini dalam tehnik PRA disebut analisa Seasonal Calender (analisa kalender musim).

Seasonal calender adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang masing-masing artinya sebagai berikut: *seasonal* adalah jadwal permusim, sedangkan *calendar* adalah penanggalan. Sebagai terminologi dalam tehnik PRA arti *seasonal calendar* adalah suatu tehnik PRA yang dipergunakan untuk mengetahui kegiatan utama, masalah, dan kesempatan dalam siklus tahunan yang dituangkan dalam bentuk diagram. Hasilnya, yang digambar dalam suatu 'kalender' dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana program.

Tujuan dipergunakannya analisa *seasonal calender* dalam tehnik PRA adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pola kehidupan masyarakat pada siklus musim tertentu.
- b. Mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu luang masyarakat.
- c. Mengetahui siklus masalah yang dihadapi masyarakat pada musim-musim tertentu.
- d. Mengetahui siklus peluang dan potensi yang ada pada musim-musim tertentu

Bagaimana Pembuatan Kalender Musim?

Kalender musim dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Sering kali dipakai simbol-simbol. Untuk simbol tersebut dapat dimanfaatkan biji-bijian, daun-daunan, batu-batuan dan lain-lain. Kalau digambar di tanah, hasilnya harus digambar kembali di atas kertas. BANDUNG

Contoh kalender musim:

KALENDER MUSIM
DESA : TERAS MOJOSONGO BOYDALI
2 JUNI 2003.

	OKT	NOR	DES	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP
CURAH HUJAN	o	o	ooo	oooo	oooo	oo	oo	o				
POLA TANAM	PADI				PADI				BERO			
KEGIATAN PETANI	TANAM			PANEN	TANAM			PANEN				
TEMAGA KERJA	oo	oooo	oooo	oo	oo	oo	oooo	oo	oooo	oooo	oooo	oooo
KEBUTUHAN HIDUP	o	oo	o	oooo	oooo	oo	oo	oooo	oooo	oo	oo	o
MABUK & JUDI				oooo	oo			oooo	oo			
PEACURAN	o	oo	oo			o	oo			oo	oo	oooo

PESEERTA :

1. Parjono	5. Wachid AN
2. Wiro	6. Raitan
3. Kasiran.	7. EKO.
4. Mulyono	

Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim:

- a. Ajaklah masyarakat untuk menggambar sebuah kalender dengan 12 bulan (atau 18 bulan) sesuai kebutuhan. Tidak perlu mengikuti kalender tahunan, bisa mulai pada bulan lain, misalnya sesuai musim tanam.
- b. Diskusikan secara umum tentang jenis-jenis kegiatan serta keadaan apa yang paling sering terjadi pada bulan-bulan tertentu dan apakah kegiatan itu selalu terulang dari tahun ke tahun. Misalnya, pada bulan keberapa masyarakat melakukan upacara bersih desa.
- c. Sepakati bersama masyarakat tentang symbol-simbol yang akan digunakan.
- d. Ajaklah masyarakat menggambarkan kegiatan-kegiatan utama serta keadaan-keadaan kritis yang berakibat besar bagi masyarakat dalam kalender.
- e. Diskusikan lebih lanjut (lebih mendalam) bersama masyarakat tentang keadaan, masalah-masalah, sebabnya serta akibatnya
- f. Sesuaikan gambaran dengan hasil diskusi.
- g. Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi
- h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).





c. Teknik 3: Penelusuran Desa (Transect)

Transect (Penelusuran Desa) merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Dengan teknik transek, diperoleh gambaran keadaan

sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalah, perubahan-perubahan keadaan dan potensi-potensi yang ada. Hasilnya digambar dalam diagram transek atau 'gambaran irisan muka bumi'.

Jenis-jenis transek meliputi 'Transek sumber daya desa umum', Transek sumber daya alam', Transek Topik Tertentu', misalnya "transek mengamati kesehatan lingkungan masyarakat" atau "transek perkembangan agama".

Contoh Hasil Transek Dusun Kawi, Ds. Jumanoro, Kec. Jumapo, Kab. Karanganyar (th. 1999)

Topik/ Aspek				
Fata guna lahan Kondisi tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman dan Pekarangan • Tanah: Kersik (9.1) • Warna gelap dan cukup subur 	<ul style="list-style-type: none"> • Sawah • Mengandung lumpur hitam & kuning • Tanah kurang subur, tanah: kersik (8.2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai untuk irigasi • Batu dan pasir 	<ul style="list-style-type: none"> • Tegalan • Tanah merah • Tanah: kersik (9.5)
Jenis vegetasi tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Pisang, cengkeh, kelapa, jate, peta, jambu, singkong, bambu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang, lumbok, kacang Panjang, singkong 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Singkong, jati, peta, durian, nangka, singkong, pengkot pisang, pupung, pala, bambu
Manafaat	<ul style="list-style-type: none"> • Mandirikan bangunan • Sumber air (sumur) • Budidaya jate 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil tanaman untuk keperluan rumah tangga • Cakupan ditanami kacang Panjang • Sajian sering longsor • Ada pertenggaran soal batas petak antar petan. • Banyak hama (wereng, yuyu, walang, orong-orong, bluk) • Tanah kurang subur (asam/ran bantak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Air untuk irigasi • Batu dan pasir untuk bahan bangunan • Kanan kiri sepanjang sungai sering erosi/ mudah longsor • Musim kemarau debit air kecil, sehingga tidak cukup untuk pengirangan I 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk penghijauan • Kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Hasil tanaman dijual • Ada hama uret, semut merah, caceng, virus pada singkong • Musim kemarau tanah kering
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan miring dan sering ambrol • Jalan rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan beras dengan racun kimia, mekank, wereng dgn menyak tanah di lahan. Sundeup dengan cara pengeringan 5-7 hari • Perbaikan kesuburan dgn pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Belan wda 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pemerintah berupa bibit durian, sengon untuk penghijauan, Pengendalian uret dengan DDT, Furadil, mekank
Tindakan yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan jalan (dibawah) • Membuat pagar pekerangan agar tanah tidak ambrol bersama • Memanfaatkan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kesuburan dgn pupuk • Produk pertanian mengikat, perbaiki kesuburan tanah, mekanisasi biaya produksi, batas antar petak dipertumakan 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pemerintah berupa bibit durian, sengon untuk penghijauan, Pengendalian uret dengan DDT, Furadil, mekank
Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan lebih baik, Pembangunan esak (masip, gapuro, lumbung padi) untuk ekspor dilakukan • Penguatan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk pertanian mengikat, perbaiki kesuburan tanah, mekanisasi biaya produksi, batas antar petak dipertumakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air terus mengalir shgg dapat mencukupi kebutuhan di lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghijauan untuk mencegah erosi dan menyipran air tanah • Mengendalikan hama uret dan semut merah dgn mekank, amon • Tanah subur cocok untuk penghijauan • Kayu cukup banyak untuk bahan bangunan
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Warga kompak • Ada kemauan untuk lebih maju • Cocok untuk usaha peternakan • Air untuk kebutuhan RT cukup • Ada kotoran ternak untuk pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Irigasi cukup baik, sungai tidak kering musim kemarau • Dalam budidaya tanaman sudah serempak. Tampilan tanaman rumput, lahan baik untuk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Air cukup untuk pengirangan • Ada batu dan pasir 	-

Peserta : Giyono, Gyarto, Suratno, Kerno, Eko, Merto, Tono, Samjo, Tardi, Pamo

Bagaimana melakukan Transek?

Transek biasanya terdiri dari dua tahapan utama yaitu:

- perjalanan dan observasi
- pembuatan gambar transek

Hasilnya biasanya langsung digambar atas flipchart (kertas lebar). Sebelum melakukan Transek perlu disiapkan bahan dan alat seperti kertas flipchart, kartu warna-warni, spidol, makanan dan minuman. Kegiatan transek biasanya makan waktu yang cukup lama.

Perjalanan

- sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan dilakukan (misalnya penggunaan lahan, jenis tanah, pengairan, ketersediaan pakan ternak, masalah, potensi dan lain-lain)
- sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir (bisa memanfaatkan hasil Pemetaan Desa)
- lakukan perjalanan dan mengamati keadaan, sesuai topik-topik yang disepakati
- buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi (tugas pencatat)

Pembuatan gambaran transek

- sepakatilah simbol yang akan dipergunakan dan mencatat simbol dan artinya
- gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan (buatlah dengan bahan yang mudah diperbaiki / dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan)
- untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat diarahkan untuk menganalisa mengenai:
 - perkiraan ketinggian

- b) perkiraan jarak antara satu lokasi dengan lokasi lain
- c) mengisi hasil diskusi tentang topik-topik dalam bentuk bagan / matriks (lihat contoh)
- d. kalau gambar sudah selesai, mendiskusikan kembali hasil dan buat perbaikan jika diperlukan
- e. mendiskusikan permasalahan dan potensi di masing-masing lokasi.
- f. menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi.
- g. pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi.

d. Teknik 4: Bagan Hubungan Kelembagaan (Diagram Venn)

Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi *pihak-pihak apa* berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji *perannya, kepentingannya* untuk masyarakat dan *manfaat* untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja.

Tujuan

Teknik ini bertujuan memperoleh data tentang:

- a. Pengaruh lembaga/ tokoh masyarakat yang ada di wilayah terhadap kehidupan dan persoalan warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Tingkat kepedulian dan frekwensi lembaga/tokoh masyarakat dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat

Bagaimana membuat Diagram Venn?

Diagram Venn dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Sering kali dipakai kertas (yang digunting dalam bentuk lingkaran) dan spidol.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan *Diagram Venn* meliputi:

- a. Mintalah kepada peserta pertemuan baik laki-laki dan perempuan untuk membentuk beberapa kelompok dengan anggota 5-10 orang. Jika perlu minta kelompok yang dibentuk menurut jenis kelamin.
- b. Bahaslah dengan masyarakat lembaga-lembaga yang terdapat di desa (lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang akan dibahas)
- c. Catatlah daftar lembaga-lembaga pada flipchart (kertas potongan)
- d. Guntinglah sebuah lingkaran kertas yang menunjukkan masyarakat
- e. Sepakatilah mengenai simbol-simbol yang dipergunakan, misalnya:

- a) *besarnya lingkaran*: menunjukkan *pentingnya* lembaga-lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin penting suatu lembaga maka semakin besar lingkaran
 - b) *jarak dari tingkatan masyarakat*: menunjukkan *pengaruh* lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin dekat dengan lingkaran masyarakat maka lembaga tersebut semakin berpengaruh.
- f. Tulislah kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat
 - g. Bahaslah apakah lembaga-lembaga tersebut 'penting' menurut pemahaman masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut
 - h. Guntinglah kertas-kertas yang berbentuk lingkaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, tulislah nama lembaga tersebut pada lingkaran itu
 - i. Letakkanlah lingkaran masyarakat di atas lantai
 - j. Bahaslah bagaimana manfaat lembaga tersebut terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat
 - k. kalau semua lembaga telah ditempatkan, periksalah kembali dan diskusikan kebenaran informasi tersebut
 - l. Buatlah perubahan kalau memang diperlukan.
 - m. Diskusikan bersama masyarakat permasalahan dan potensi masing-masing lembaga.
 - n. Simpulkan bersama masyarakat apa yang dibahas dalam diskusi.
 - o. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan diagram dan diskusi sudah selesai, diagram digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).



Yang perlu diperhatikan pentingnnya suatu lembaga terhadap masyarakat (yang ditunjukkan oleh besarnya lingkaran) belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yang ditunjukkan oleh jarak dari lingkaran masyarakat)

e. Teknik 5: Alur Sejarah (Timeline)

Timeline adalah teknik penelusuran alur sejarah suatu masyarakat dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu.

Alasan melakukan timeline adalah:

- a. Teknik ini dapat menggali perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah dan cara menyelesaikannya, dalam masyarakat secara kronologis;
- b. Teknik ini dapat memberikan informasi awal yang bisa digunakan untuk memperdalam teknik-teknik lain;
- c. Sebagai langkah awal untuk teknik *trend and change*;
- d. Dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat dimasa lalu;
- e. Dengan teknik ini masyarakat merasa lebih dihargai sehingga hubungan menjadi lebih akrab;
- f. Dapat untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat, seperti; perkembangan desa, peran wanita, kondisi lingkungan, perekonomian, kesehatan atau perkembangan penduduk.

Tujuan

Tujuan time line adalah

- a. Mengungkap kembali alur sejarah masyarakat suatu wilayah yang meliputi; Topik-topik penting yang terjadi pada tahun-tahun tertentu.
- b. Mengetahui kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat secara kronologis.
- c. Mengetahui kejadian penting masa lalu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- d. Masyarakat memahami kembali keadaan mereka pada masa kini dengan mengetahui latar belakang masa lalu melalui peristiwa penting dalam kehidupan mereka dimasa lalu.

Langkah-langkah Pembuatan Timeline

Langkah-langkah yang dilakukan selama proses timeline adalah sebagai berikut;

- a. Memilih Nara Sumber Lokal (masyarakat asli) yang sudah lama tinggal di daerah tersebut dan benar-benar memahami sejarah wilayahnya;
- b. Tim dan Nara Sumber Lokal yang terpilih menentukan waktu dan tempat pertemuan;
- c. Setelah semua peserta berkumpul, ketua tim memperkenalkan diri kepada seluruh peserta yang hadir;
- d. Selanjutnya menjelaskan pengertian timeline (penelusuran alur sejarah desa), tujuan serta manfaat kegiatan ini;
- e. Diteruskan dengan menjelaskan hal-hal yang akan digali dalam pembuatan timeline;
- f. Setelah semua Nara Sumber Lokal paham, peserta & tim bisa memulai proses penggalan data melalui sumbang saran, tanya jawab dan diskusi. Untuk

memulai dialog bisa dibuka dengan bagaimana asal usul nama daerah tersebut.

Catatan : Kalender sosial didesa akan membantu mengingat peristiwa dimasa lalu. Dalam menggali informasi bisa dengan memberikan stimulasi (mengingatkan kembali) topik-topik seperti misalnya;

Catatan khusus: point-point yang dapat dipakai untuk memulai penggalian informasi.

- a) Dimulai dengan mengetengahkan sejarah terbentuknya pemukiman, asal-usul penduduk atau perkembangan jumlah penduduk.
 - b) Bisa dilanjutkan dengan topik tentang alur sejarah tersedianya sarana atau prasarana (infrastruktur); jalan raya, saluran air, perumahan, puskesmas, sekolah, sarana komunikasi, transportasi dan tempat ibadah.
 - c) Untuk memperdalam topik bisa dilanjutkan dengan diskusi tentang perubahan status pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah. Serta perkembangan usaha ekonomis masyarakat, misalnya kapan mulai menjadi pegawai, pedagang, petani dan jenis pekerjaan lain.
 - d) Selain topik diatas, bisa ditambah dengan menggali tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap masukan pembinaan atau pendampingan yang diterima. Serta apa saja masalah yng dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
 - e) Untuk mengetahui bagaimana penanganan kesehatan, bisa diskusi tentang terjadinya wabah penyakit yang pernah menimpa daerah tersebut.
 - f) Kejadian yang berulang dapat dijadikan topik penting untuk dibahas lebih mendalam.
 - g) Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.
- e. Pemandu memfasilitasi jalannya dialog & diskusi selama proses, misalnya; informasi/ data apa saja yang harus dimasukkan tabel timeline dan bagaimana cara menyusunnya kronologis alur sejarah. Serta cara cross check data.
 - f. Setelah penulisan selesai, pemandu meminta kepada seluruh peserta untuk melakukan triangulasi data (check dan recheck data / probing data yang sudah dikumpulkan). Usahakan untuk mempresentasikan hasil timeline kepada para peserta, untuk penyempurnaan data, apabila waktunya mencukupi.
 - g. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).

Review Data

Setelah proses timeline selesai, pemandu meminta kepada seluruh peserta untuk melakukan triangulasi data (check dan recheck data atau probing data yang sudah dikumpulkan).

Contoh matrik:

Kejadian	Tahun

f. Teknik 6: Bagan Perubahan dan Kecenderungan (Trend and Change)

Bagan Perubahan dan Kecenderungan merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan. Hasilnya adalah bagan/matriks perubahan dan kecenderungan yang umum desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu, misalnya jumlah pemeluk agama Islam, jumlah musholla, jumlah masjid, jumlah gereja, jumlah majlis taklim, dan lain-lain.

Tujuan

Tujuan melakukan analisa trend and change dalam PRA adalah untuk:

- Mengetahui kejadian masa lalu dalam rangka memprediksi kejadian pada masa yang akan datang.
- Mengetahui hubungan sebab akibat dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi suatu fenomena.
- Dengan Bagan Perubahan, masyarakat dapat memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mampu mengantisipasi kecenderungan tersebut.

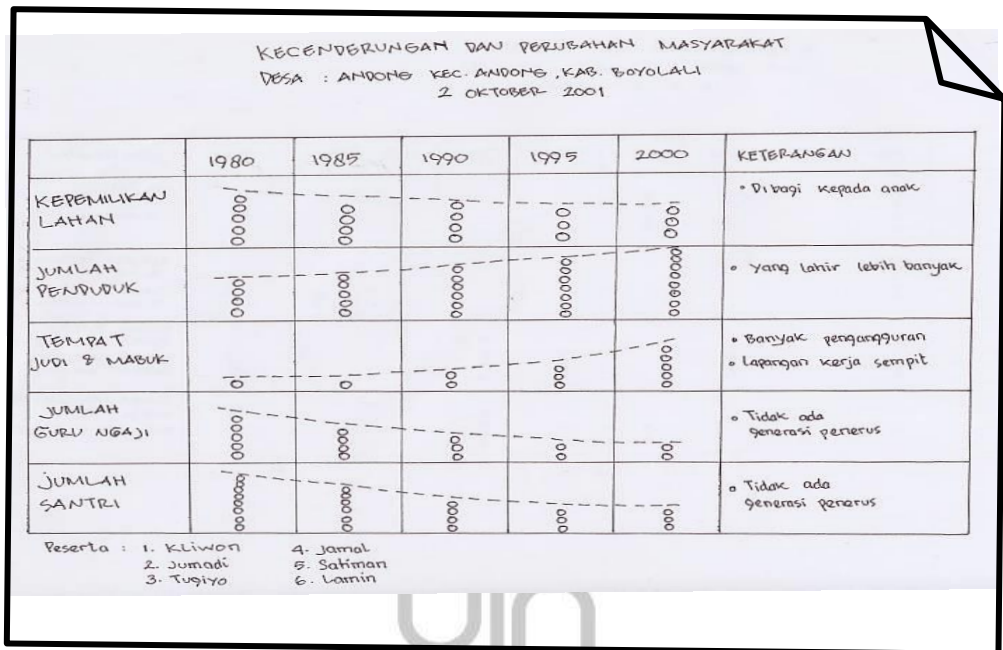
Bagaimana membuat Bagan Perubahan dan Kecenderungan?

Bagan Perubahan dan Kecenderungan dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Bahan-bahan yang bisa digunakan, berupa biji-bijian, kerikil, atau bahan lain yang mudah didapat dan mudah dipahami masyarakat. Hasilnya Bagan Perubahan dan Kecenderungan digambar atas kertas, papan tulis atau di tanah.

Langkah-langkah pembuatan Bagan Perubahan meliputi:

- Lakukan persiapan-persiapan seperlunya.
- Diskusikan bersama masyarakat perubahan-perubahan penting yang terjadi di desa serta sebab-sebabnya.
- Sepakatilah topik-topik utama yang akan dicantumkan ke dalam bagan.
- Sepakatilah simbol-simbol yang akan dipakai, baik untuk topik (gambar-gambar sederhana) maupun untuk nilai (biji-bijian, kerikil dan lain-lain)
- Sepakati bersama masyarakat selang waktu (range) yang akan dicantumkan.
- Buatlah bagan di kertas, papan tulis atau tanah

- g. Diskusikan perubahan-perubahan, sebab-sebab, akibat-akibatnya, apakah perubahan akan berlanjut pada masa depan (kecenderungan)
- h. Simpulkan bersama masyarakat persoalan-persoalan dibahas dalam diskusi
- i. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).



g. Teknik 7: Bagan Peringkat (Matrix Ranking)

Kata *Matrix Ranking* berasal dari Bahasa Inggris. Matrix artinya susunan dalam bentuk kolom. Ranking artinya urutan, posisi, kedudukan, penggolongan. Dengan demikian arti terminologi matrix ranking adalah suatu tehnik PRA yang dipergunakan untuk menganalisa dan membandingkan topik yang telah diidentifikasi dalam bentuk ranking/ scoring atau menempatkan topik menurut urutan penting tidaknya topik bagi masyarakat.

Tujuan

Tujuan dilakukannya Matrix Ranking adalah untuk membuat urutan prioritas 'pilihan' bagi masyarakat.

Alasan digunakannya Matrix Ranking

Matrix Ranking perlu dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dapat memilih prioritas secara obyektif dan demokratis serta sistematis.

- b. Masyarakat memilih secara obyektif dan rasional

Langkah-langkah Membuat Matrix Ranking

Persiapan

1. Persiapkan bahan-bahan temuan dari proses sebelumnya, bahan tersebut akan menjadi masukan pokok untuk diskusi matriks ranking.
2. Tentukan anggota masyarakat sebagai peserta, diutamakan adalah mereka yang mengikuti secara aktif proses sebelumnya.
3. Jumlahnya tidak ditentukan, tetapi sebanyak mungkin mereka yang mengikuti proses sebelumnya.

Pelaksanaan

- a. Jelaskan tujuan pertemuan dan jelaskan proses dan langkah yang akan dilakukan. Jelaskan juga bahwa peranan semua peserta sama, semua orang yang hadir dapat menyampaikan pandangannya.
- b. Mulailah presentasi hasil proses sebelumnya. Presentasikan topik-topik temuan kepada masyarakat. Lebih baik presentasi dilakukan oleh masyarakat sendiri, pilih wakil diantara mereka untuk mempresentasikan hasil kelompok.
- c. Mulailah membuat contoh matrix ranking, dengan menuliskan daftar masalah yang pernah ditemukan. Time line, trend and change sangat berguna untuk membantu menganalisa prioritas masalah.
- d. Diskusikan dengan masyarakat. Tanyakan kriteria pemilihan alternatif dengan pertanyaan, faktor akibat/ dampak bagi masyarakat, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan.
- e. Pemilihan alternatif ini bisa memanas situasinya. Dalam kondisi begini kadang-kadang perlu adanya break sebentar untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berbeda pendapat mendiskusikannya (lobby). Hindari kejadian Walk out, karena hal ini akan memperpanjang masalah.
- f. Setelah selesai tanyakan kepada masyarakat: apakah mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut. Manakah yang paling bisa diatasi. Tanyakan faktor pembatas, faktor pendukung, dan manfaat bagi masyarakat.
- g. Simpulkan bersama masyarakat persoalan-persoalan dibahas dalam diskusi.
- h. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan matriks dan diskusi sudah selesai, matriks digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).

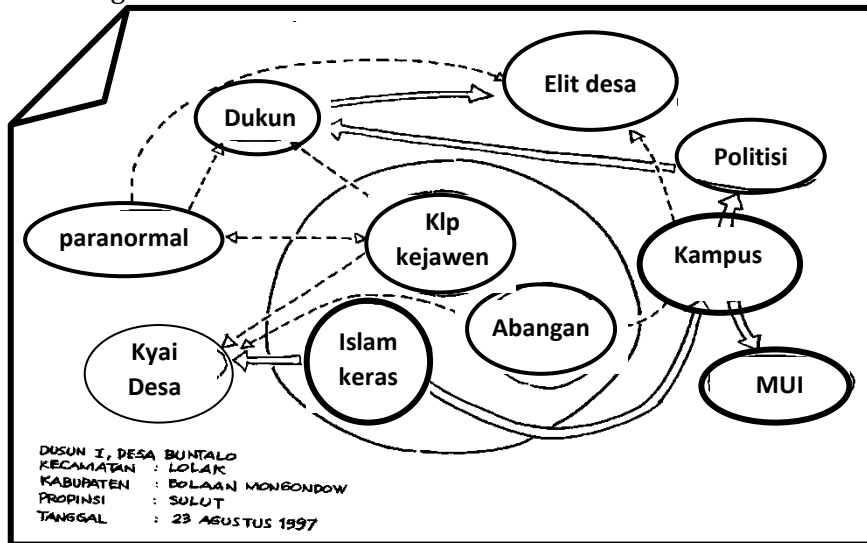
h. Teknik 8: Diagram Alur

Diagram Alur menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini dapat digunakan untuk menganalisa alur penyebaran keyakinan dan tata nilai keagamaan dalam masyarakat.

Tujuan

Pembuatan diagram alur digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam:

- Menganalisa dan mengkaji suatu system.
- Menganalisa fungsi masing-masing pihak dalam system dan mencari hubungan antara pihak-pihak dalam sistem itu, termasuk bentuk-bentuk ketergantungan.
- Memberikan kesadaran kepada masyarakat dimana posisi mereka sekarang.



Langkah-langkah pembuatan diagram alur meliputi:

- Lakukan diskusi umum tentang semua alur “misalnya penyebaran agama Islam” di desa dan dari luar desa.
- Ajaklah masyarakat untuk mengidentifikasi:
dimana pusat-pusat produksi tata nilai agama?
siapa yang berperan dalam persoalan tersebut (individu, kelembagaan)?
Siapa yang memiliki otoritas penafsiran tata nilai agama tersebut?
- Ajaklah masyarakat menggambar alur: mulai dengan yang paling mudah dikenali dan buatlah garis ke setiap pihak.
- Ajaklah masyarakat untuk membahas perilaku atau kepentingan dari masing-masing pihak.
- Ambillah kesimpulan berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat.
- Tawarkan kepada masyarakat: apakah situasi tersebut harus ditangani? Kalau masyarakat berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka Ajaklah masyarakat untuk menentukan prioritas yang harus segera ditangani dari soal tersebut.
- setelah semua selesai, Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).

i. Teknik 9: Wawancara Semi Terstruktur

Merupakan suatu tehnik yang berfungsi sebagai alat bantu setiap tehnik PRA. Pengertian wawancara semi terstruktur adalah alat penggalian informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu.

Wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu, Pembicaraan lebih santai, namun dibatasi oleh topik yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama.

Wawancara ini dapat dikembangkan sejauh relevan dengan pokok bahasan yang disepakati; dengan memberi kesempatan pada masyarakat / responden untuk menentukan hal-hal penting yang perlu digali, sangat terbuka dasar proses diskusi.

Tujuan

- a. Mengkaji kondisi spesifik yang ada di masyarakat misalnya: jenis usaha keluarga, jumlah tenaga kerja, sumber daya yang dimiliki, kesehatan keluarga, pembagian tugas laki-laki dan perempuan, tingkat keberagamaan, aliran agama yang dianut dsb.
- b. Mengkaji berbagai aspek kehidupan di desa menurut pandangan masyarakat – individu dalam masyarakat tersebut.
- c. Membandingkan : Keadaan individu / keluarga dengan keadaan umum masyarakat desa. Pandangan individu / keluarga dengan pandangan kelompok masyarakat.

Sumber informasi

- a. Perorangan
- b. Kelompok

Jenis informasi yang dapat digali antara lain :

- a. Profil keluarga
- b. Profil perorangan
- c. Daftar kegiatan sehari-hari

Langkah-langkah Wawancara Semi Terstruktur :

- a. Persiapan :
 - Kajian ulang informasi yang sudah ada;
 - Menyusun daftar topik diskusi atau pokok pertanyaan yang akan menjadi focus wawancara.
- b. Lakukan perkenalan dengan seperlunya: misalnya obrolan-obrolan sedikit tentang keadaan keluarga (Bina Swasana).
- c. Buatlah pertanyaan mulai dari yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- d. Usahakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat netral.
- e. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Wawancara Semi Terstruktur:

- a. Hindarkan : Pertanyaan dengan jawaban yang terarah (ya-tidak)
- b. Ingat, wawancara semi terstruktur tidak sama dengan penyuluhan.
- c. Tidak Menasehati, banyaklah mendengar dengan sabar.
- d. Tidak Mengabaikan informasi.
- e. Tidak menilai (menghakimi).
- f. Tidak emosi.
- g. Yang penting santai.
- h. Yang penting kritis

Contoh:

Daftar pertanyaan Profil "Bu-TRI"

® Identitas keluarga

- a. Nama suami (suami, Bp.) :
- b. Umur (tgl. Lahir) :
- c. Nama istri (ibu) :
- d. Umur (tgl. Lahir) :
- e. Tanggal /th. Perkawinan :

® Riwayat Keagamaan

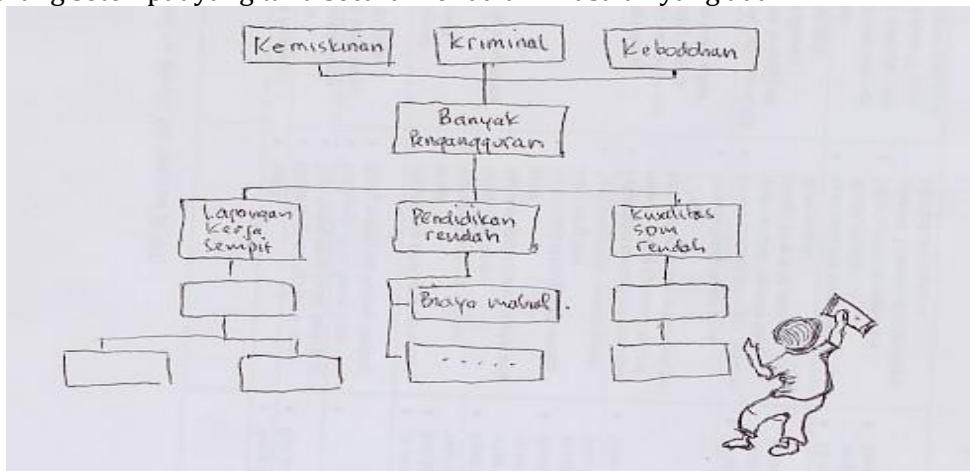
- a. Kapan mengenal Islam :
- b. Siapa yang mengenalkan Islam :
- c. Bagaimana Islam itu sebenarnya :
- d. Bagaimana tentang keyakinan lain selain Islam :
- e. Dimana memperdalam agama dilakukan :
- f. Siapa yang punya hak istimewa dalam menafsirkan agama di desa ini:
- g. bagaimana menjalankan ibadah di desa ini:
- h. Mengapa ibu, ikut melakukan kenduri di bawah pohon asem?

j. Teknik 10: Pohon Masalah dan Harapan (Teknik Analisa Masalah)

Disebut teknik analisa masalah karena melalui teknik ini, dapat dilihat 'akar' dari suatu masalah, dan kalau sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini kadang-kadang mirip pohon dengan akar yang banyak.. Analisa Pohon Masalah sering dipakai dalam masyarakat sebab sangat visual dan dapat melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama.

Teknik ini dapat dipakai dalam situasi yang berbeda, tapi yang lebih penting dari itu, teknik ini dapat digunakan terutama untuk menelusuri penyebab suatu masalah. Teknik ini adalah teknik yang cukup fleksibel. Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah

hanya dilihat secara sepintas. Teknik Analisa Pohon Masalah harus melibatkan orang setempat yang tahu secara mendalam masalah yang ada.



Langkah-langkah membuat pohon masalah

- Diskusikan bersama masyarakat, masalah apa yang ingin diselesaikan. Tentukan masalah utama, yang menurut masyarakat perlu diselesaikan.
- Tuliskan masalah utama yang mau diatasi ditulis di kartu metaplan, lalu di tempel di lantai atau dinding sebagai 'batang' pohon.
- Mulai dari batang, diskusikan mengenai penyebab-penyebab.
- Dari setiap penyebab yang muncul, tanyakan lagi 'kenapa begitu?', 'apa penyebabnya?' Untuk mempermudah cara pikir, dan mencek bahwa tidak ada yang dilupa, menganggap bahwa setiap masalah adalah akibat
- Dari kondisi lain - Tanyalah 'Kondisi ini adalah akibat dari apa?' Akhirnya akan muncul gambar yang lengkap mengenai penyebab-penyebab dan akibatnya - hasilnya akan sangat terinci. Komentar apa saja yang dikeluarkan sebagai penyebab dapat ditulis supaya makin komplit. Setelah selesai, semua komentar bisa dikaji kembali.
- Akar dibahas sampai mendalam sehingga akhirnya masalah terakhir dalam satu akar akan dibalik dan menjadi kegiatan atau rencana tindak lanjut
- Langkah -langkah ini pada akhirnya memunculkan satu gambar yang lengkap dan terinci - dengan akar yang diwakili oleh penyebab masalah, dan akibat dari masalah tersebut.
- Setelah gambar selesai, tanyakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul.
- Kalau sudah lengkap, ajaklah masyarakat (tanpa terkecuali) untuk melihat secara keseluruhan masalah-masalah akar dari masalah utama.
- Juga mintalah komentar, apakah ada penyebab yang muncul beberapa kali walaupun dalam 'akar' lain? Dari semua informasi yang muncul, diperlihatkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah akar sehingga akibat diatas tidak terjadi. Jika akibat diatas masih terjadi, berarti masih ada masalah yang perlu diatasi.

- k. Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan, lebih baik kalau selesai gambar Pohon Masalah, masalah-masalah yang muncul diprioritaskan supaya yang paling penting dapat diatasi lebih dahulu.
- l. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi.

Kesimpulan :

- a. Identifikasi masalah utama (yang perlu dipecahkan)
- b. Identifikasi penyebab masalah tersebut (curah pendapat)
- c. Mengelompokkan sebab-sebab tersebut
- d. Mengidentifikasi tingkatan penyebab (I, II dan III)
- e. Menentukan tujuan dan harapan (keluaran)
- f. Memprioritaskan penyebab yang paling mendesak
- g. Memprioritaskan harapan yang paling efektif, mudah dan realistis untuk dicapai
- h. Menyusun rencana kegiatan – ingatlah '5W, dan 1H'

3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut

Tahapan-tahapan dalam menyusun rencana tindak lanjut tersebut sebagai berikut:

a. Persiapan Dalam Tim Fasilitator

Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif seringkali difasilitasi oleh Tim Fasilitator yang dibentuk oleh agen pembangunan atau agen perubahan (*agent of change*). Anggota Tim Fasilitator dapat terdiri dari orang luar (dari agen pembangunan) maupun orang dalam (wakil-wakil masyarakat), pria dan wanita dan dari macam-macam disiplin/sektor. Tim Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif terdiri dari beberapa orang, dianjurkan minimal terdiri dari 3 orang. Yang penting di sini adalah kekompakan Tim yang merupakan penentu dari kelancaran proses kajian.

Persiapan tim tersebut sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan di Pedesaan. Persiapan yang baik diharapkan dapat mencegah munculnya kebosanan masyarakat, konflik di antara fasilitator dan kebingungan masyarakat.

b. Menentukan informasi yang akan dikaji

Informasi yang akan dikaji tergantung arah KKN Sisdamas. Tujuan bisa sangat umum (pemberdayaan masyarakat) atau bisa terkait dengan suatu isu, misalnya pengembangan agama atau perlindungan lahan kritis. Sesuai tujuan tersebut, yang telah disepakati dengan masyarakat, diputuskan *informasi apa* akan dikaji. Tim PRA harus memperhatikan bahwa informasi yang akan dikumpulkan harus memiliki relevansi dan tidak terlalu banyak ; yang penting kualitasnya.

c. Menentukan teknik yang ingin dipakai

Berdasarkan informasi yang perlu dikaji, diputuskan teknik apa akan dipakai. Dari pengalaman dalam pelaksanaan *PAR*, teknik yang seringkali

digunakan untuk mulai proses kajian meliputi pemetaan desa, kalender musim dan alur sejarah desa.

d. Menentukan dan menyediakan bahan pendukung dan media;

Media dan bahan pendukung ini sangat tergantung teknik *PRA* yang dipilih. Bahan pendukung yang bisa dimanfaatkan terdiri dari 'bahan dari luar' seperti kertas, spidol, kapur tulis dan lain-lain. Bahan lokal yang sering dipakai merupakan batu-batuan, daun-daunan, biji-bijian dan lain-lain. Pilihan bahan dan media yang cocok dan bervariasi sangat penting untuk mengatasi kebosanan masyarakat dan fasilitator.

D. Pengorganisasian Masyarakat (Orgamas)

Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus Pemetaan Sosial.

Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik berbentuk paguyuban atau perhimpunan atau memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dll selama dalam organisasi tersebut mempunyai ciri-ciri:

- a. Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan.
- b. Setiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (*common bond*), seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dsb
- c. Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela, bukan karena terpaksa;
- d. Membangun semangat saling percaya;
- e. Bekerjasama dalam kemitraan;
- f. Secara damai memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini menanggulangi masalah-masalah sosial;
- g. Selalu menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi;
- h. Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah;
- i. Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan;
- j. Mampu bekerja secara mandiri;

Organisasi ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja (Pokja) ditingkat basis/ RT/ Komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pokja sebagai representasi kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok sosial pada tingkat akar rumput, yang mempunyai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Dalam KKN Sisdamas diharapkan warga dapat terlibat dan menerima manfaat dari kelompok ini, dengan cara menjadi anggotanya dan diperlakukan adil seperti anggota masyarakat yang lainnya.

Pengembangan Pokja sebagai tim teknis orgamas tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat asalkan warga mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok, dan penerima manfaat langsung (bantuan program) diprioritaskan warga miskin dan marginal (*mustadh'afiin*). Oleh karena itu hasil identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan dalam siklus pemetaan sosial menjadi dasar untuk pengelompokan masyarakat, terutama bagaimana strategi agar warga terlibat.

Kegiatan-kegiatan dalam satu kelompok bisa gabungan antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dikembangkan adalah: pembentukan koperasi atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dengan kegiatan simpan-pinjam anggota kelompok, bantuan pinjaman modal usaha untuk anggota kelompok tidak mampu, kartu sehat, tabungan pendidikan dan sebagainya. Paling penting adalah bahwa kelompok ini dibentuk atau dikembangkan bukan untuk menjadi pembenaran untuk mendapatkan bantuan uang dari pihak lain, akan tetapi menjadi wahana bersama untuk saling belajar memecahkan masalah, saling peduli dan menghargai di antara anggotanya dan kalau sudah semakin berkembang dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak luar.

Pada pengorganisasian masyarakat dalam kegiatan KKN Sisdamas dapat disederhanakan dengan mengoptimalkan organisasi yang ada atau membentuk yang baru sebagai Organisasi Masyarakat Warga (OMW) dalam bentuk perkumpulan atau paguyuban berdasar kesepakatan bersama dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat hasil refleksi sosial.

E. Perencanaan Partisipatif (Cantif)

Dokumen perencanaan partisipatif (*dorantif*) merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan Sosial, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Sosial secara swadaya.

Walaupun siklus ini merupakan siklus lanjutan dari pemetaan sosial akan tetapi pelaksanaannya setelah pengorganisasian masyarakat dan pengembangan Pokja. Kegiatan ini dilakukan belakangan, dengan dasar pemikiran bahwa pengurus organisasi yang akan mengambil keputusan untuk pengembangan program-program mana dari kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Di sisi lain penerima manfaat dari program ini diprioritaskan pada kantung masalah yang sudah diidentifikasi dalam pemetaan swadaya, dan tergabung dalam Pokja, sehingga Pokja dibentuk

bukan karena adanya KKN Sisdamas tetapi justru sebaliknya penerima manfaat program didasarkan kepada Pokja yang sudah ada misalnya Pokja yang didaulat akan melaksanakan kegiatan adalah Pokja Mekar Jaya yang sebelumnya nama kelompok tani di Desa Mutiara Terpendam .

Dalam pengembangan dorantif, sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya lainnya diharapkan bukan hanya dari masyarakat, akan tetapi harus dipikirkan pemenuhannya dari kerjasama dengan pengusaha/ swasta dan dinas/pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai program yang sejalan dengan dorantif yang disusun oleh masyarakat.

Lebih baik lagi apabila dorantif dikomparasikan dengan dokumen musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Bahkan akan jauh lebih baik apabila dorantif hasil KKN Sisdamas menjadi rujukan utama musrenbang. Pada gilirannya, setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan sudah tepat tujuan dan tepat sasaran dan bagaimana hasilnya. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperbaharui data-data yang ada, sehingga kesalahankesalahan akan segera dapat ditemukan dan dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan program apabila diperlukan.

Isi dorantif dapat dikembangkan dari contoh instrumen dengan menggunakan program Microsoft Excel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Vol	Frek	Lokasi	Satuan	Harga	Jumlah	Sumber Biaya
								Swadaya

Sumber Biaya		Nama Pokja	Penanggung Jawab
Anggaran Desa	Lainnya (donatur/swasta)		

Setelah dokumen perencanaan partisipatif ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh organisasi masyarakat, maka langkah selanjutnya menyusun rencana tahunan dengan melibatkan seluruh stakeholder desa sebagaimana kegiatan pada rembug warga pada sosialisasi awal.

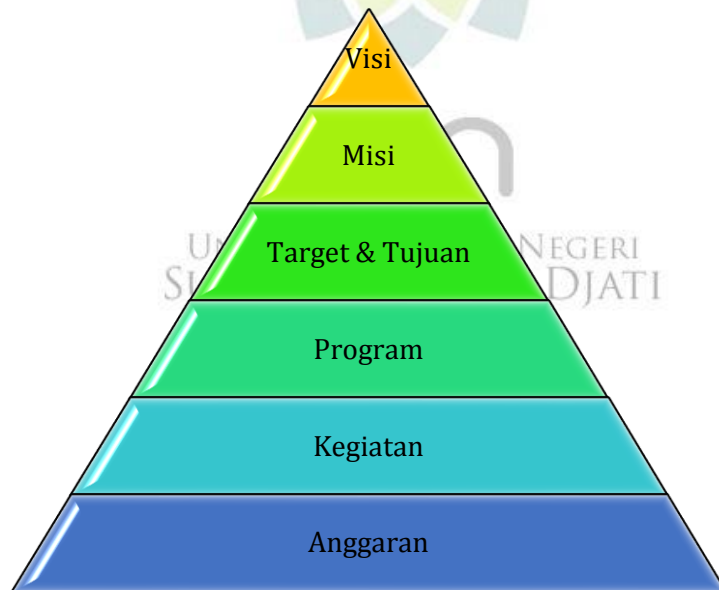
Rembug warga dalam rangka rantif ini mengagendakan beberapa hal:

- a. Menyusun visi, misi, target, tujuan, kegiatan dan anggaran secara deduktif hasil refleksi, pemetaan dan perencanaan dengan terlebih dahulu memilah kategori masalah, kebutuhan dan masalah yang muncul dan perlu ditangani. Pada kegiatan ini dapat dibantu oleh DPL dan peserta KKN untuk memunculkan konsep kegiatan dan program, narasi tujuan, target, misi dan visi. Sehingga struktur penyusunan

bersifat bottom up dari bawah ke atas seperti piramida terbalik untuk diubah menjadi piramida utuh.



Kemudian menjadi piramida normal:



Pastikan kegiatan ini minim konflik dan seluruh prosesnya terdokumentasi dengan baik.

- b. Tentukan rencana prioritas kegiatan pilihan warga masyarakat desa baik untuk dilaksanakan selama KKN Sisdamas sebagai model kegiatan.

- c. Susun rencana tahunan (renta) dari keseluruhan hasil pemetaan sosial dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat dilaksanakan secara swadaya atau mendapat bantuan dari pemerintah. Renta ini dapat disusun untuk 3 atau 5 tahun kedepan sesuai kesepakatan masyarakat. Dokumen ini dapat menjadi acuan program masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan.

F. Sinergi Program (Sipro)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Hasil perencanaan partisipatif ditentukan prioritas program kegiatan yang disepakati bersama oleh seluruh stakeholder di desa lokasi KKN melalui semacam forum rapat paripurna. Rapat tersebut seyogyanya difasilitasi oleh organisasi masyarakat yang disepakati melalui pendampingan peserta KKN dan DPL. Pada forum itu hadir aparatur desa, (Kades, LPMD, BPD dll) tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda. Kemudian forum tersebut membahas sinergi program yang memungkinkan kegiatan tersebut dapat masuk pada agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) pada setiap bulan Januari dan atau memungkinkan dapat melakukan *chaneling* dengan pihak-pihak swasta atau pengusaha yang ada disekitar desa tersebut. Selain itu, forum tersebutpun menetapkan angka partisipasi swadaya masyarakat baik dalam bentuk tenaga, bahan material atau uang tunai yang dikapitalisasi.

Kemudian tim yang ditunjuk sebagai penanggung jawab menyusun proposal kegiatan dengan angka yang riil dari hasil prioritas program dengan proses pendampingan oleh peserta KKN dengan struktur penulisan terlampir. Beberapa hal penting yang perlu dieksplorasi pada tahapan sipro ini diantaranya:

1. Penetapan Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat menekankan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Perubahan pola pikir masyarakat yang lebih produktif dari sebelumnya.
- b. Perubahan positif taraf perekonomian masyarakat.
- c. Penguatan kelembagaan desa.

2. Fasilitasi Penyusunan Proposal

Ruang Lingkup Proposal, sebagai berikut:

- a. Penguatan budaya lokal (*local wisdom*)
- b. Pengembangan ekonomi kreatif (home industri, agro industri, dll)
- c. Pembentukan peta bisnis, peta wisata (jika memiliki potensi wisata)

- d. Peningkatan kepedulian desa sadar wisata (jika memiliki potensi wisata)
- e. Peningkatan kesadaran pendidikan.

3. Menggalang Keswadayaan Warga

Metode yang digunakan yaitu metode partisipatif dimana tim pelaksana LP2M, peserta mahasiswa, Pemerintah Daerah bersama masyarakat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program. Prosedur pelaksanaan KKN, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi pedoman umum KKN kepada calon anggota peserta KKN, pengurus desa dan tokoh masyarakat.
- b. Pembentukan kelompok program KKN yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat.
- c. Melibatkan instansi pemerintahan lain, yaitu Dinas terkait dengan program yang dilaksanakan.

Program kerja yang telah diselesaikan akan lebih efektif lagi jika dilakukan tindak lanjut terhadap program tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan lagi suatu program ke arah yang lebih baik.

Pengembangan minat dan bakat khususnya yang berhubungan dengan keterampilan masyarakat bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan jika diperlukan dilaksanakan penyuluhan keterampilan khusus (sesuai kebutuhan daerah) serta diadakan berbagai pelatihan penunjang dalam bidang keterampilan yang berhubungan dengan minat dan bakat masyarakat setempat.

G. Pelaksanaan Program (Pepro)

Pada tahap ini semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing panitia. Relawan diarahkan oleh pokja untuk mengisi pos-pos seksi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam bentuk sikap gotong royong, jujur, peduli, tanggungjawab dan sebagainya diimplementasikan bersama pada tahap ini.

Kegiatan dimulai dengan sosialisasi baik secara lisan dan tulisan. Secara lisan dapat dilakukan secara *face to face* atau melalui pengumuman pengeras suara milik masyarakat seperti dari masjid atau mushola dengan oleh tokoh masyarakat dan atas persetujuan bersama. Secara tulisan dapat berbentuk surat, leaflet atau spanduk, papan proyek dll.

Tahap berikutnya pelaksanaan program perlu diatur ritme keterlibatan partisipan apabila waktu yang dibutuhkan lebih dari satu hari. Pokja dapat membuat jadwal relawan yang akan turut mengikuti kegiatan. Selain itu setiap sumbangan tambahan secara spontan dari warga dalam berbagai bentuk harus tercatat pada pembukuan pokja untuk dikapitalisasi dan bahan laporan.

Sebagai manifestasi tridharma perguruan tinggi, peserta KKN dan DPL seyogyanya terlibat sebagai relawan dan bukan sebagai pelaku utama pada

pelaksanaan program serta berusaha mendokumentasikan perilaku masyarakat pada proses dan hasil pelaksanaan program berlangsung.

H. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pada tahapan ini, organisasi masyarakat memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintahan desa untuk membentuk tim Monev. Kemudian tim melakukan tugas monitoring dan evaluasi dengan mengecek kembali hasil pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana yang terdapat dalam proposal. Hasil temuan monev direkomendasikan kepada organisasi masyarakat untuk bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Setelah dipandang selesai tim monev menerbitkan Berita Acara yang menerangkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan. Kemudian organisasi masyarakat membubarkan Pokja dan dan tim monev serta membentuk organisasi pemelihara seperti untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Anonimous, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata KKN Mandiri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. (Semaarang: LP2M UIN Walisongo, 2016) hlm. 2.
- Anonimous, *KKN Integrasi Interkonseksi*. (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Anonimous, *Panduan pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. (Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian kepada, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).
- Anonimous, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat*. (Jakarta: LP2M UIN Syahid, 2011)
- antrock, John W. 2002. *Life-Span Development – Perkembangan Masa Hidup Jilid 2*, terjemahan Juda Damanik., Ahmad Chusairi. Jakarta : Erlangga. Bandura, A, 1986. *Social foundations of thought and action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, Albert. 1999. *Self-efficacy in Changing Societies*. United States of America: Cambridge University Press.
- Bradford Verter; "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu." In: Society Theory, Vol. 21, No. 2 (June, 2003)
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eva Nugraha, *Panduan Untuk Survei Lokasi KKN-PPMM 2016* (Jakarta : Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lp2m Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Fukuyama, F. 1997. *Social Capital*. George Mason University; Institute of Public Policy.
- Fukuyama, Fancis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtue and The Creation of Prosperity*, New York Free Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2008, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Iris Press
- Hikmat, Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*: Longman. Australia.

- M, Dalton, 1959. *Men Who Manage*. 15 Maret 2011. <http://www.pemustaka.com/>.
- Mikkelsen, Birtha. 1999. *Metode Peneleitian Partisipatoris dan Upaya – upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhibbin, Syah. 2005. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raya Grafindo Perkasa
- Payne, M. 1997. *Social Work and Community Care*. London: McMillan.
- Portes, Alejandro. 2006. "Institutions and Development: A Coceptual Reanalysis." *Population and Development Review* 32 (2): 233-262 (June).
- Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work : CivicTraditions in Modern Italy*. Princeton : Princeton University Press.
- Ramdani Wahyu Sururie dan Iir abd Haris. 2016. *Konsep dan Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKIN*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rimbatmaja, Risang. 2004. *Segmentasi Pemilih Pemula di DKI Jakarta pada Pemilu 2004 Berdasarkan Karakteristik-Karakteristik. Sosio-Politik dan Life-Style*. Skripsi. UI. Depok.
- Safei, Agus Ahmad dan Machendrawati, Nanih. 2003. , " *Pengembangan masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi,*" Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Shamdan, Agus, 2004. " *Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Aspek Ketahanan Sosial Masyarakat,*" Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.
- UIN Walisongo merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 tanggal 17 Oktober 2014.
- Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo , 27 Juli 2016
- Wawancara dengan Ali Imran, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo , 27 Juli 2016
- Wawancara dengan Fatimah, Ketua LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016
- Wawancara dengan Kapus PKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jaka Badranaya, 2 Agustus 2016
- Wawancara dengan Wildan, Sekretaris LP2M UIN Yogyakarta, 12 Juli 2016
- Wijaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Woolfolk Hoy, A. 2004. *Educational Psychology 9th Edition*. USA : Pea
- World Bank, 1998, *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital*.